

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**LAPORAN  
PERTANGGUNG  
JAWABAN**

**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
TAHUN 2024**



**BANDAR LAMPUNG  
2025**

# **Daftar Isi**

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	I-1
A. Dasar Hukum Penyusunan LPJ	I-2
B. Gambaran Umum OPD	I-6
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA, PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN</b>	II-1
A. Perencanaan Strategi	II-1
B. Rencana Kinerja	II-35
C. Perubahan Penjabaran Anggaran	II-45
D. Realisasi Anggaran	II-52
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	III-1
A Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III-1
B Kebijakan Strategi yang Ditetapkan	III-14
C Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LPJ Tahun Anggaran 2024	III-14
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>	IV-1
A Urusan Pemerintahan yang di Tugas Pembantuan	IV-1
<b>BAB V PENUTUP</b>	V-1

## **Daftar Tabel**

	<b>Halaman</b>	
Tabel : 2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	II-7
Tabel : 2.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	II-9
Tabel : 2.3	Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman <i>(Strength-Weakness Opportunity-Threat / SWOT)</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	II-13
Tabel : 2.4	Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung dan Renstra K/L	II-19
Tabel : 2.5	Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	II-20
Tabel : 2.6	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	II-36
Tabel : 2.7	Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2023	II-38
Tabel : 2.8	Perubahan Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Lampung Tahun 2023	II-46
Tabel : 2.9	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2023	II-54
Tabel : 2.10	Gambaran Tapkin, Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	II-58
Tabel : 3.1	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2023	III-14

## BAB I

# PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut maka kepala daerah dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain partisipasi dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada masyarakat sebagai lembaga eksekutif daerah secara transparan dan terukur, dalam bentuk penyampaian hasil-hasil kinerja/capaian indikator pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang melingkupi pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia pada Tanggal 4 Januari 2007 telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban OPD yaitu berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2023 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

#### **A. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LPJ**

1. Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan

- dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2012;
  21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
  22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
  23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011;
  24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
  25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
  26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
  27. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung;
  28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023;

29. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
31. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58);
32. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung;

## B. GAMBARAN UMUM Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

### 1. Pembentukan Organisasi

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Bandar Lampung sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi strategis untuk dapat menyandingkan pendayagunaan *Comprehensive Information Data base* tersebut dengan berperannya masyarakat informasi di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Susunan Organisasi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

(1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. JF Perencana.
- c. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik, membawahi:
  1. JF Pranata Hubungan Masyarakat;
  2. JF Pranata Hubungan Masyarakat;
  3. JF Pranata Hubungan Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan E-Government
  1. JF Pranata Komputer;
  2. JF Pranata Komputer;
  3. JF Pranata Komputer.
- e. Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
  1. JF Sandiman;
  2. JF Sandiman;
  3. JF Sandiman.
- f. Bidang Statistik dan Data Elektronik, membawahi:
  1. JF Statistisik;
  2. JF Statistisik;
  3. JF Statistisik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (terlampir).

## **2. Gambaran Singkat, Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Susunan Organisasi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung adalah pelaksana sebagian Urusan Pemerintah Daerah di

Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan sebuah OPD di lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertugas untuk melakukan **PROSES KOMUNIKASI** dan menerapkan **DISIPLIN INFORMATIKA** dalam hal penyelenggaraan tata kerja pemerintah Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan hubungannya dengan Kepemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian dlsb) serta dengan Masyarakat (Publik, Dunia Usaha, Media Massa dlsb).

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika beserta tupoksinya adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

(2) Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup nyameliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Pemberdayaan E-Government, Persandian, kemanan informasi dan siber, serta Data dan Statistik;
- b. Merumuskan rencana strategis dinas dengan mengacu pada rencana strategis pemerintahan Kota Bandar Lampung untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Pemberdayaan E-Government, Persandian, kemananan informasi dan siber,

- serta Data dan Statistik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan program dan kegiatan dinas dengan menjabarkan dalam rencana program dan kegiatan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif;
  - d. Menetapkan rencana kinerja tahunan dinas melalui rumusan, sasaran indikator serta anggaran agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Memverifikasi rencana operasional kegiatan dinas sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan;
  - f. Mengkoordinasikan, membina dan memberi petunjuk pelaksanaan kerja tata laksana pemerintahan dan administrasi pelaksanaan publik serta reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku guna meningkatkan produktifitas kerja;
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup kota, konten lintas sectoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi melalui pertemuan dan rapat agar dihasilkan rumusan struktur dan organisasi dan tata kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. Menetapkan kebijakan pengembangan kinerja melalui pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi pengembangan kinerja dan menyusun rencana strategis (Renstra) serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas,

guna peningkatan produktivitas dan pengembangan kinerja pemerintah kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- i. Mengarahkan usulan layanan infrastruktur data center, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan penyiaran dan informasi publik dinas dan badan berdasarkan usulan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- j. Melaporkan akuntabilita kinerja dinas melalui laporan akuntabilitas kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintah Kota, antar lembaga/instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi Penyusunan Program dan Informasi, Urusan Umum dan Kepegawaian, serta Pengelolaan

Keuangan dan Aset.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program dan kerja sekretariat dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan;
- c. Pengelolaan urusan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan asset;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di sekretariat dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- e. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sekretariat dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Penyedia pelaksanaan tugas bawahan di sekretariat dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. Merumuskan penetapan rencana pelaksanaan kegiatan sekretariat dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- h. Memfasilitasi kegiatan sekretariat dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- i. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di sekretariat dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa depan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat dinas sesuai tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja di sekretariat dinas;

I. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas.

Sekretariat dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. JF Perencana.
- d. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- e. Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum danKepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana,urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan analisis jabatan/analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi pegawai lima tahun dan petjabatan aparatur sipilnegara;
- c. Menyusun dokumen analisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
- d. Menyusun rancangan dan pengembangan instrument, materi dan validasi uji kompetensi pengisian jabatan,pengembangan karier,promosi,mutasi serta penugasan aparatur sipil negara;
- e. Melaksanakan analisis dan evaluasi kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;
- f. Menyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan);

- g. Menyusun dokumen pengelolaan kinerja aparatur sipil negara;
- h. Menyusun instrument pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai;
- i. Menyusun dokumen penilaian SKP;
- j. Menyusun dokumen analisis disiplin, pemberhentian, penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara
- k. Menyusun analisis sistem penggajian,tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara.
- l. Menyusun dokumen analisis proses cuti,proses jaminan pension dan jaminan hari tua aparatur sipil negara
- m. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian jabatan fungsional;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliput penyusunan anggaran,pengadministrasian keuangan pengadmnistrasian gaji dan perjalanan dinas;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Menyusun laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pend Asli Daerah (PAD);
- d. Menyusun laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;
- e. Menyusun laporan pengolahan dan analisis data, laporan rekomendasi,dan laporan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
- f. Menyusun laporan pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- g. Melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, pelaporan

- keuangan dan aset;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisas anggaran;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

JF Perencana mempunyai tugas :

- a. Memformulasikan sajian untuk analisis rencana kerjadinas;
- b. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan rencana kerja dinas;
- c. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana kerja dinas;
- d. Menyusun dan menguji alternatif kriteria dan model hubungan kasual dinas;
- e. Menghimpun, menyusun dan menganalisis perencanaan kebijakan strategi jangka pendek dan jangka menengah dinas;
- f. Menghimpun, menyusun dan menganalisis perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral maupun regional dinas;
- g. Menghimpun, menyusun dan menganalisis rancangan rencana anggaran, informasi dan pembiayaan pembangunan kerja dinas;
- h. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dan informasi dinas dengan mitra legislatif;
- i. Mengendalikan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dinas;
- j. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait penyusunan, dan analisis program dan pembiayaan pembangunan dan evaluasi kerja dinas
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4)Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan

Pemerintah Kota di bidang Informasi Dan Komunikasi Publik.

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Informasi Dan Komunikasi Publik;
- b. menyusun program, mengevaluasi pelaksanaan dan model pelayanan informasi dan kehumasan;
- c. menganalisis konten media terpilih dan isu publik;
- d. memberikan konsultasi, advokasi, atau negosiasi pada pelayanan informasi dan kehumasan
- e. mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau pertemuan sejenis internasional
- f. menyusun konsep pengembangan system dan strategi pelayanan informasi dan kehumasan;
- g. mengembangkan standar dan system layanan informasi dan kehumasan;
- h. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Informasi Dan Komunikasi Publik;
- i. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik;
- k. Mengelola Laporan Masyarakat melalui SP4N LAPOR
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik dibantu oleh:

- a. JF Pranata Hubungan Masyarakat;
- b. JF Pranata Hubungan Masyarakat;
- c. JF Pranata Hubungan Masyarakat.

JF Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi

- dibidang;
- b. Mengikuti rapat pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan kehumasan;
  - c. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
  - d. Mengolah isu public dan memberikan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah, presentasi, dan pidato;
  - e. Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam forum konsultasi pelayanan informasi dan kehumasan;
  - f. Mengolah isu hubungan internal dan membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat program,rutin,berkala;
  - g. mengevaluasi model layanan informasi public untuk PPID Kota Bandar Lampung;
  - h. Mengelola pengaduan dari masyarakat melalui system pengaduan SP4N LAPOR;
  - i. Mengikuti seminar,lokakarya,pertemuan yang terkait dengan pelayanan informasi PPID Kota Bandar Lampung;
  - j. Melaksanakan tugas sebagai pemandu acara (master of ceremony);
  - k. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan;
  - l. Menelaah bahan untuk penyelesaian sengketa informasi dan kehumasan;
  - m. Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan;
  - n. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga/instansi terkait pengelolaan dan pengolahan informasi dan kehumasan;
  - o. Mengevaluasi pelaksanaan advokasi hubungan kelembagaan;
  - p. mengolah data, menganalisa data dan Menyusun laporan dalam rangka audit komunikasi;

- q. mengidentifikasi kasus atau masalah komunikasi;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

JF Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan hubungan kemitraan,kelompok informasi masyarakat,pertunjukan rakyat;
- b. Mengikuti rapat pimpinan,kunjungan kerja atau cara seremonial pimpinan untuk kelompok informasi masyarakat,pertunjukan rakyat, desiminasi media;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kelompok informasi Masyarakat (KIM) dan Perbedayaan Pertunjukkan Rakyat(Petunra);
- d. Menyelenggarakan TalkShow dan seminar pelayanan informasi dan kehumasan;
- e. Mengikuti seminar,lokakarya,pertemuan yang terkait dengan hubungan kemitraan publik dan kehumasan;
- f. Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam forum konsultasi pelayanan informasi untuk kelompok Informasi masyarakat dan kelompok pemberdayaan pertunjukan rakyat;
- g. Monitoring pembinaan hubungan kemitraan dgn lembaga penyiaran,pertelevision,kelompok informasi masyarakat,kelompok pertunjukan rakyat;
- h. Mengevaluasi seminar,lokakarya,pertemuan yang terkait dengan hubungan kemitraan publik dan kehumasan;
- i. Melaksanakan kegiatan kunjungan kemitraan di Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Perbedayaan Pertunjukkan Rakyat(Petunra);
- j. Melaksanakan tugas sebagai pemandu acara(master of ceremony) dan moderator dalam kegiatan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan pertunjukan Rakyat;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan advokasi hubungan kelembagaan

- dengan lembaga penyiaran;
- i. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan hubungan dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Perbedayaan Pertunjukkan Rakyat (Petunra);
  - m. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan hubungan eksternal dengan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Perbedayaan Pertunjukkan Rakyat (Petunra);
  - n. Mengidentifikasi kasus atau masalah dalam diseminasi informasi terkait kemitraan;
  - o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pelaksanaan kemitraan komunikasi; dan
  - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

JF Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi untuk publikasi dimedia cetak, elektronik, media sosial, media luar ruang dan media digital;
- b. Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media cetak, elektronik, dan daring (online), sebagai anggota dewan redaksi;
- c. Melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab teknis dalam kegiatan teleconference, talkshow, prescompres untuk publikasi dengan media cetak, media elektronik, mediasosial;
- d. Mengikuti rapat pimpinan, kunjungan kerja atau acara seremonial pimpinan untuk publikasi;
- e. Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam forum konsultasi pengelolaan media informasi publik milik Pemerintah Kota;
- f. Melaksanakan pelayanan informasi publik, penyiapan materi mengolah materi untuk publikasi dimedia publik;
- g. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan media informasi public;
- h. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan membuat

laporan kegiatan pengelolaan media publik dilingkup pemerintah kota;

- i. Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai peserta;
- j. Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pengelolaan media publik sebagai peserta atau moderator;
- k. Melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab teknis dalam kegiatan tele conference yang berkaitan dengan media informasi publik;
- l. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau pertemuan sejenis nasional;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan hubungan eksternal dan internal;
- n. Monitoring dan mengolah isu publik di media publik, media publik elektronik, cetak dan media sosial;
- o. Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan;
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antara lembaga/instansi terkait pengelolaan media public;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### (5) Kepala Bidang Pemberdayaan E-Government

Bidang Pemberdayaan E-Government mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan E-Government.

Bidang Pemberdayaan E-Government mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan E-Government;
- b. Melakukan analisis dampak teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini dan trennya terhadap perubahan strategi pemerintah;
- c. menyusun dan mengkaji kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;

- d. melakukan analisis kesenjangan dan roadmap terhadap komponen enterprise architecture;
- e. menyusun dan mengkaji tata kelola teknologi informasi;
- f. menyusun pola acu (template) untuk strategi operasional dan mengkaji kelayakan implementasi rencana teknologi informasi;
- g. menyusun standard operational procedure untuk kegiatan information technology service management
- h. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi ketersediaan layanan teknologi informasi
- i. menyusun kebijakan data, standar data, atau prosedur pengelolaan data
- j. menyusun arsitektur integrasi data, standar metadata dan kebijakan keamanan data
- k. melakukan analisis data dan evaluasi audit teknologi informasi;
- l. Melaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang pemberdayaanE-Government;
- m. Pengawasan,pembinaan dan pengendalian pemberdayaan E-Government;
- n. Pelaksanaan koordinasi dankerjasama antar lembaga/instansi terkait pemberdayaanE-Government;
- o. Perancangan,pengembangan dan pemberdayaan E-Government dalam rangka mewujudkan terciptanya ekosistem Kota Cerdas Bandar Lampung (Smart City Bandar Lampung);
- p. Melaksanakan Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemberdayaan E-Government dibantu oleh:

- a. JF Pranata Komputer;
- b. JF Pranata Komputer;
- c. JF Pranata Komputer.

Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

JF Pranata Komputer mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana backup, pemulihan data dan kebutuhan teknologi data;
- b. Melakukan implementasi data mining;
- c. Menyusun kebutuhan atau standar keamanan data dan definisi kontrol atau prosedur keamanan data;
- d. Melakukan analisis perilaku akses pengguna;
- e. Menyusun kerangka acuan kerja;
- f. Menyusun usulan pembangunan sistem informasi;
- g. Menyusun rencana dan melakukan studi kelayakan sistem informasi;
- h. Melakukan identifikasi kebutuhan pengguna sistem informasi;;
- i. membangun dan mengembangkan layanan system informasi berbasis elektronik untuk layanan dasar pemerintahan, publik, layanan bisnis dan UMKM;
- j. melakukan analis dan pemodelan proses sistem informasi;
- k. membuat algoritma pemrograman;
- l. menyusun definisi rule validasi pada program aplikasi sistem informasi;
- m. menyusun skenario uji coba sistem informasi;

- n. melakukan pemeriksaan dan analisis hasil uji coba sistem informasi;
- o. melakukan pemantauan (monitoring) kinerja aplikasi sistem informasi di lingkungan instansi;
- p. melakukan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pemberdayaan aplikasi informatika;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

JF Pranata Komputer mempunyal tugas :

- a. merumuskan master plan pelaksanaan dan tata Kelola e-government yang berkesinambungan
- b. menyusun rekomendasi persetujuan arsitektur data;
- c. menyusun rencana kegiatan layanan pengelolaan data;
- d. melakukan supervisi terhadap organisasi dan staf pengelola data;
- e. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pengembangan ekosistem Kota Cerdas Bandar Lampung (Smart City Bandar Lampung);
- f. Melaksanakan Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data;
- h. Menyusun bahan sosialisasi tentang pengelolaan data;
- i. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan data;
- j. Melakukan dan menyusun analisis model data instansi;
- k. Menyusun arsitektur teknologi data;
- l. Melakukan perancangan data model dan busines sintelligence;
- m. Melakukan analisis kebutuhan informasi;
- n. Menyusun prosedur pengujian rancangan layanan akses data;
- o. Melakukan perancangan integrasi data;

- p. Melakukan evaluasi hasil pengujian rancangan integrasi data;
  - q. Menyusun prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi;
  - r. Melakukan review dokumen manajemen risiko;
  - s. Melakukan pengukuran risiko;
  - t. Menyusun solusi teknis penanganan risiko;
  - u. Menyusun kerangka acuan kerja;
  - v. Menyusun rencana dan melakukan studi kelayakan untuk pengolahan data;
  - w. Menyusun prosedur, petunjuk teknis pelaksanaan, pemantauan (monitoring), dan evaluasi pengolahan data;
  - x. Melakukan analisis data spasial; dan
  - y. Menyusun skenario uji coba program multimedia;
  - z. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga terkait pemberdayaan e-government;
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

JF Pranata Komputer mempunyai tugas :

- a. Membangun dan mengembangkan pusat data (data center) dan command center;
- b. Melakukan pengukuran performa teknologi informasi;
- c. Menyusun rencana pembiayaan teknologi informasi dan strategi operasional rencana teknologi informasi;
- d. Mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi;
- e. menyusun dan mengelola portofolio layanan teknologi informasi;
- f. mengelola penyedia jasa atau barang dan kapasitas layanan internet dan intranet di lingkup pemerintah kota;
- g. menyusun perencanaan transisi layanan teknologi informasi;

- h. mengelola perubahan layanan teknologi informasi, asset,konfigurasi dan pengetahuan layanan teknologi informasi;
- i. melakukan validasi, pengujian, dan evaluasi layanan teknologi informasi;
- j. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- k. Melaksanakan kewenangan pemberian rekomendasi;
- l. Mengelola rilis dan deployment layanan teknologi informasi serta event dan insiden kegiatan teknologi informasi;
- m. Melakukan analisis awal, pengujian, verifikasi, atau validasi untuk kebutuhan audit teknologi informasi, kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks, sertaan analisis kondisi sistem jaringan komputer kompleks yang sedang berjalan;
- n. Membuat rancangan logis (logical design) dan rancangan fisik (physical design) sistem jaringan komputer;
- o. Menyusun rancangan dan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
- p. Melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (monitoring) jaringan;
- q. Menyusun prosedur keamanan jaringan dan petunjuk teknis sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;
- r. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan jaringan;
- s. Menyusun rencana pengoperasian infrastruktur teknologi informasi;
- t. Menyusun kerangka acuan kerja;
- u. Melakukan evaluasi proposal teknis penyedia barang atau jasa infrastruktur teknologi informasi;
- v. Menyusun rencana pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi;

- w. Melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (monitoring) kinerja infrastruktur teknologi informasi;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(6) Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber

Bidang Persandian,Keamanan Informasi dan Siber mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota diBidang Persandian,Keamanan Informasi dan Siber.

Bidang Persandian,Keamanan Informasi dan Siber mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Persandian,Keamanan Informasi dan Siber;
- b. Melakukan analisis tren Persandian,Keamanan Informasi dan Siber;
- c. Melakukan kajian kebijakan Persandian,Keamanan Informasi dan Siber;
- d. Melakukan evaluasi norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) di bidang Persandian,Keamanan Informasi dan Siber;
- e. Melakukan evaluasi penanggulangan dan pemulihan insiden Persandian,keamanan Informasi dan Siber;
- f. Melakukan evaluasi implementasi Persandian,Keamanan Informasi dan Siber;
- g. Mendesain algoritma kriptografi, manajemen kunci kriptografi, dan protokol kriptografi;
- h. Melakukan pengkajian aspek kriptografis/ manajemen kunci perangkat Persandian,Keamanan Informasi dan Siber;
- i. Melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang persandian,Keamanan Siber dan Keamanan Informasi;
- j. Penentuan standar Persandian,Keamanan Informasi dan Siber

- dilingkup Pemerintah Kota;
- k. Pengawasan,pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Persandian,Keamanan Informasi dan Siber;
  - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait Persandian,Keamanan Informasi dan Siber
  - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Persandian,Keamanan Informasi dan Siber dibantu oleh :

- a. JF Sandiman;
- b. JF Sandiman;
- c. JF Sandiman.

Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Ahli Muda yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

JF Persandian Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria(NSPK) di bidang persandian;
- b. Melakukan penyusunan Instrumen persandian;
- c. Melakukan supervisi audit/penilaian persandian;
- d. Melakukan penilaian persandian;
- e. Melakukan audit persandian;
- f. Melakukan analisis kebutuhan persandian;
- g. Melakukan penyusunan program pembinaan komunitas dibidang persandian;
- h. Melakukan analisis insiden persandian;

- i. Melakukan penanggulangan insiden persandian;
- j. Melakukan pemulihan insiden persandian;
- k. Melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan persandian;
- l. Melakukan investigasi persandian;
- m. Melakukan investigasi penyelenggaraan persandian dan sumber daya persandian;
- n. Melakukan analisis strategis polaan caman persandian;
- o. Melakukan perumusan spesifikasi teknis perangkat persandian;
- p. Melakukan implementasi desain persandian;
- q. Melakukan pengujian perangkat persandian;
- r. Melakukan pengujian algoritma kriptografi dan steganografi;
- s. Melakukan pengujian prototipe kunci kriptografi;
- t. Melakukan analisis kekuatan perangkat persandian;
- u. Melakukan mitigasi insiden persandian;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

JF Sandiman mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang keamanan informasi;
- b. Melakukan penyusunan Instrumen keamanan informasi;
- c. Melakukan supervisi audit/penilaian keamanan informasi;
- d. Melakukan penilaian keamanan informasi;
- e. Melakukan penilaian informasi;
- f. melakukan audit keamanan informasi;
- g. melakukan analisis kebutuhan keamanan informasi;
- h. melakukan penyusunan program pembinaan komunitas dibidang keamanan informasi;

- i. melakukan analisis insiden keamanan informasi;
- j. melakukan penanggulangan insiden keamanan informasi;
- k. melakukan pemulihan insiden keamanan informasi;
- l. melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan keamanan informasi;
- m. melakukan investigasi keamanan informasi;
- n. melakukan analisis sumber bukti digital dan informasi lainnya dalam rangka forensik digital;
- o. melakukan analisis smalware;
- p. melakukan pengujian (proof of concept) eksplorasi celah keamanan sistem informasi;
- q. melakukan analisis strategis pola ancaman keamanan informasi;
- r. melakukan analisis hasil pengumpulan data intelijen(intelligence information gathering);
- s. melakukan perumusan spesifikasi teknis perangkat keamanan informasi;
- t. melakukan implementasi desain perangkat keamanan informasi;
- u. melakukan pengujian perangkat keamanan informasi;
- v. melakukan uji kesesuaian keamanan modul kriptografi, dan perangkat teknologi informasi;
- w. melakukan analisis kekuatan perangkat keamanan informasi;
- x. melakukan mitigasi insiden keamanan informasi;
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang keamanan siber;
- b. Melakukan penyusunan Instrumen keamanan siber;
- c. Melakukan supervisi audit/penilaian keamanan siber;
- d. Melakukan penilaian keamanan siber;
- e. Melakukan audit keamanan siber;
- f. Melakukan analisis kebutuhan keamanan siber;

- g. Melakukan penyusunan program pembinaan komunitas dibidang keamanan siber;
- h. Melakukan analisis insiden keamanan siber;
- i. Melakukan penanggulangan insiden keamanan siber;
- j. Melakukan pemulihan insiden keamanan siber;
- k. Melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan keamanan siber;
- l. Melakukan investigasi keamanan siber;
- m. Melakukan analisis strategis pola ancaman keamanan siber;
- n. Melakukan perumusan spesifikasi teknis perangkat keamanan siber;;
- o. Melakukan implementasi desain perangkat keamanan siber;
- p. Melakukan pengujian perangkat keamanan siber;
- q. Melakukan analisis kekuatan perangkat keamanan siber;
- r. Melakukan mitigasi insiden keamanan siber;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(7) Kepala Bidang Statistik

Bidang Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Bidang Data dan Statistik;

Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Data dan Statistik;
- b. merancang dan membuat pedoman pengolahan kegiatan statistik untuk validitas data;
- c. memeriksa tabel/grafik hasil kegiatan statistik yang akan disajikan tingkat nasional;
- d. menyusun publikasi dan ringkasan eksekutif statistik tingkat nasional;

- e. memberikan konsultasi statistik dan menyiapkan materi pengarahan dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat khusus;
- f. melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik khusus
- g. memberikan bimbingan penuh kader statistisik sampai mencapai tingkat pasca sarjana per orang, sebagai pembimbing utama
- h. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang Data dan Statistik;
- i. Pengawasan ,pembinaan dan pengendalian Data dan Statistik
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar lembaga/instansi terkait Data dan Statistik;
- k. Statistik Sektoral bidang komunikasi dan informatika;
- l. Melaksanakan Satu Data Indonesia;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Data dan Statistik dibantu oleh :

- a. JF Statistisik;
- b. JF Satistisik;
- c. JF Statistisik.

Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Muda yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

JF Statistisik mempunyai tugas :

- a. Menelaah bahan/informasi pendukung untuk kegiatan statistik sektoral;
- b. mengumpulkan,mengolah, menyimpan dan menyajikan data statistik sektoral
- c. menyusun metode dan program pemilihan sampel pada kegiatan sampling;
- d. menghitung penimbang dalam rangka estimasi kegiatan statistik;

- e. membuat dan meneliti peta indeks kegiatan statistik;
- f. memeriksa hasil penarikan sampel kegiatan observasi berdasarkan wilayah kerja;
- g. membuat estimasi parameter dan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan statistik sektoral dan distribusi produksi statistic sektoral;
- j. mengevaluasi pengelolaan metadata dan disimenasi statistic sektoral;
- k. penyelenggaraan pembinaan rekomendasi statistik,metadata indicator statistik dan metadata kegiatan statistik.
- l. Pelaksanaan koordinasi satu data Indonesia;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

JF Statistik mempunyai tugas :

- a. Merancang dan membuat pedoman pengolahan kegiatan statistik untuk penyuntingan dan penyandian hasil pengumpulan data;
- b. membuat program entri data dengan validasi hasil kegiatan statistik;
- c. menyusun dan menetapkan standar teknis pertukaran, penyimpanan dan pemberian akses data elektronik di lingkup Pemerintah Kota;
- d. melaksanakan pengendalian dan penetapan kewenangan hak akses terhadap data elektronik;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data base antar SKPD di lingkup Pemerintah Kota
- f. memeriksa tabel/grafik database hasil kegiatan statistik yang

- akan disajikan tingkat provinsi;
- g. melakukan analisis data basemen dalam satu sektor;
  - h. menetapkan standar penyimpanan, klasifikasi dan pemilahan data elektronik;
  - i. pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan data elektronik di lingkup Pemerintah Kota
  - j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasamaan antar lembaga/instansi terkait pengelolaan data elektronik;
  - k. Melaksanakan satu data Indonesia terkait data di Pemerintah Kota;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

JF Statistik mempunyai tugas:

- a. Menyusun publikasi statistik tingkat provinsi;
- b. Menyusun ringkasan eksekutif tingkat provinsi;
- c. Membuat outline untuk publikasi;
- d. Mengumpulkan literatur/referensi untuk publikasi;
- e. Menelaah bahan/informasi pendukung untuk kegiatan literasi data statistik;
- f. Memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan;
- g. Menyiapkan materi pengarahan statistik tingkat lanjutan;
- h. Memberikan pengarahan statistik dalam rangkap penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan;
- i. Melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik tingkat lanjutan
- j. membuat,menyiapkan,menyediakan dan mengumpulkan sumber literasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan

dan atau pelayanan publik meliputi sumber perundangan, panduan teknis, bahan ajar elektronik, literatur digital dan atau sejenis referensi untuk publikasi

- k. melaksanakan pembinaan,pengawasan dan evaluas terhadap pengembangan literasi data dan informasi dilingkup Pemerintah Kota
- l. melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pengembangan literasi data dan informasi
- m. memberikan bimbingan penuh kader statistic sampai mencapai tingkat pasca sarjana perorang,sebagai pembimbing pendamping,pembimbing utama atau penguji;
- n. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar lembaga/instansi terkait pengembangan literasi data dan informasi;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional ada yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :
  - a) JF Analis Kebijakan
    - JFAnalis Kebijakan mempunyai tugas sebagai berikut :
      - 1. Membentuk kompetensi manajerial dalam manajemen diri dan membangun tim sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
      - 2. Menelaah kembali rencana kajian dan analisis kebijakan yang sudah dibuat oleh analis kebijakan ahli pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

3. Menentukan metode kajian sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Mengembangkan opsi/alternatif kebijakan dari data atau informasi yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Menganalisis dinamika politik dan budaya birokrasi dalam melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Menganalisis pilihan metode sederhana dalam penilaian kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. Menulis naskah rekomendasi kebijakan berdasarkan kerangka yang telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  8. Memprakarsai pelaksanaan diskusi kelompok terarah rancangan kebijakan dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan/atau kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Menganalisis bidang pekerjaan dan hubungan kerja antar-instansi dalam melakukan Kajian dan Analisis Kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. Membangun jejaring kerja dengan internal dan eksternal organisasi tempat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur  
Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan petjabat antar aparatur sipil negara pada dinas;
  2. menganalisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
  3. menganalisis proses pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
  4. mengevaluasi pelaksanaan promosi, mutasi dan penugasan antar aparatur sipil negara
  5. mengelola sistem informasi manajemen karier aparatur sipil negara;
  6. menganalisis perangkat/ instrumen pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
  7. menyusun dan memvalidasi instrumen uji/sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara;
  8. menganalisis kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;
  9. menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja;
  10. mengelola dan membuat catatan kinerja pegawai;
  11. menyusun instrumen pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai dan dokumen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
  12. menyusun indikator kinerja utama (key performance indicator) dan kompetensi dalam penilaian kinerja aparatur sipil negara.
- c) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pengolahan, analisis

- data serta monitoring terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Memberikan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan pembiayaan daerah;
  3. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
  4. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pengolahan, analisis data serta monitoring terkait laporan keuangan dinas/daerah;
  5. Melakukan identifikasi, inventarisasi pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  6. Memberikan rekomendasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  7. melakukan monitoring dan evaluasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  8. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana dekonsentrasi;
- d) Jabatan Fungsional Arsiparis
- Jabatan Fungsional Arsiparis mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun konsep pedoman pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. Menilai/menyeleksi arsipe lektronik yang akan disusutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  3. Menyiapkan inventaris arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaantugas;
  4. Memberikan layanan konsultasi teknis kearsipan dinamis sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

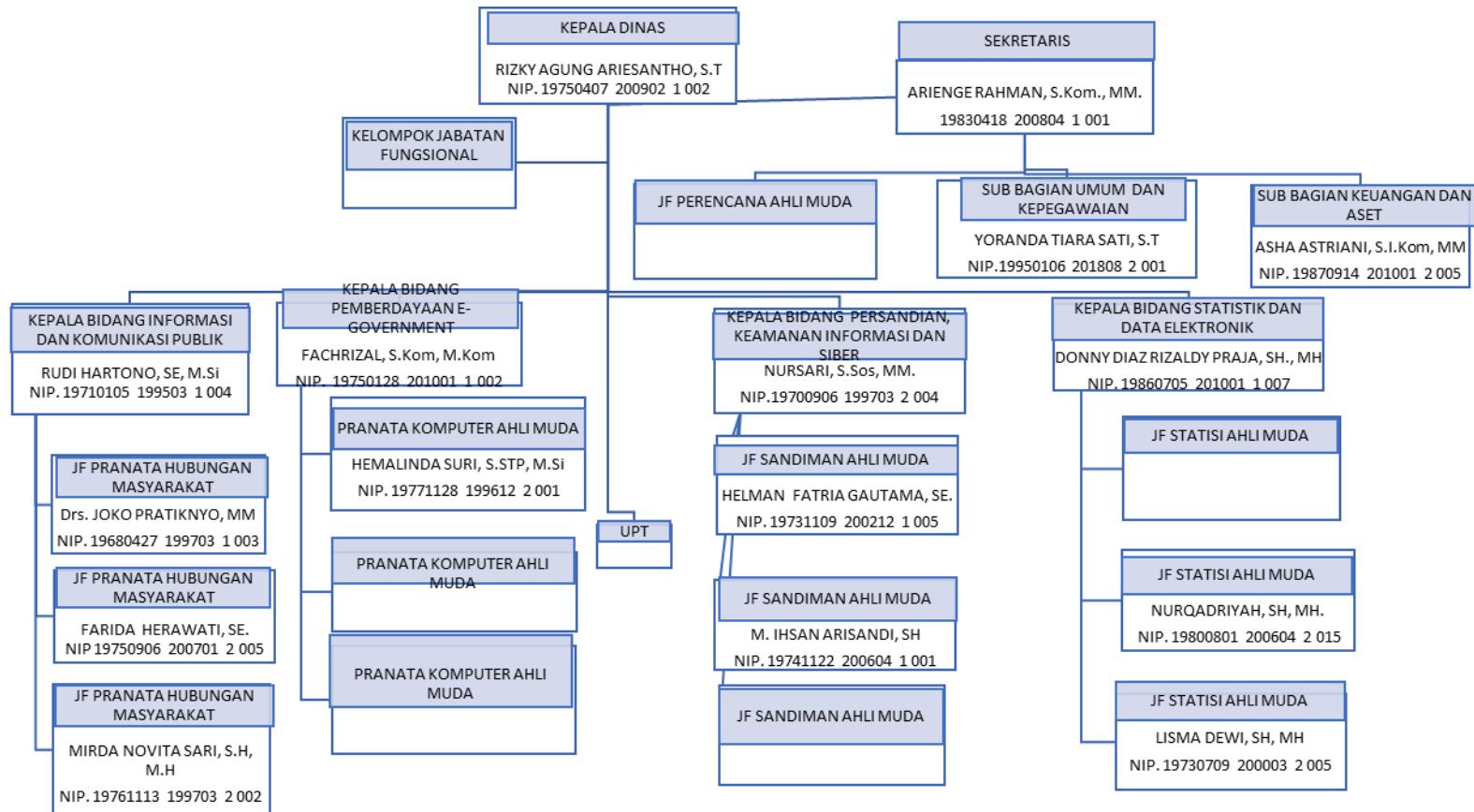
5. Menyusun materi penyuluhan kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksana antar tugas;
6. Mengumpulkan bahan publikasi kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Merancang petunjuk teknis pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menganalisa data/menyusun konsep petunjuk teknis pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mengikuti bimbingan teknis kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Melakukan pengawasan kearsipan dinamis sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Tahapan

Jenis, Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

## TAHUN 2024



### **3. Gambaran Cakupan Kegiatan/Wilayah Pelayanan**

Dinas Komunikasi dan informatika Kota Bandar Lampung memiliki cakupan wilayah kegiatan dan pelayanan yang meliputi seluruh aspek atau wilayah yang berada di Kota Bandar Lampung. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo meliputi penyampaian informasi dan menghimpun informasi melalui website pemerintah kota Bandar lampung yakni :[www.bandarlampungkota.go.id](http://www.bandarlampungkota.go.id)

### **4. Data Umum Kependudukan/Kelompok masyarakat yang menjadi target binaan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung memiliki target binaan yakni seluruh lapisan masyarakat Kota Bandar Lampung dan dunia yang memerlukan informasi mengenai penyenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA, PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan janji-janji politik kepada masyarakat ketika proses pemilihan kepala daerah, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2021).

#### **1. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG**

##### **VISI dan MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG SESUAI DENGAN RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026**

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik terutama menyangkut pada keterbukaan informasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam perspektif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, perwujudan Masyarakat kota seperti yang disebutkan akan selalu berkaitan dengan bagaimana semua elemen pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung berperan sesuai dengan porsinya masing-masing didalam hal mengkomunikasikan semua informasi yang diperlukan secara tepat, tepat cara dan tepat sasaran. Dalam hal ini komunikasi memegang peran yang amat vital terhadap capaian target pembangunan, karena hakikat pembangunan yang menyeluruh membutuhkan peran serta seluruh elemen didalamnya khususnya bagaimana cara Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mengkomunikasikan informasi yang berkaitan

dengan strategi, tujuan dan rencana pembangunan serta menyerap segala aspirasi masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan itu sendiri.

Dalam perspektif Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, perwujudan Masyarakat Kota seperti yang disebutkan akan selalu berkaitan dengan bagaimana semua elemen pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung berperan sesuai dengan porsinya masing-masing didalam hal mengkomunikasikan semua informasi yang diperlukan secara tepat, tepat cara dan tepat sasaran. Dalam hal ini komunikasi memegang peran yang amat vital terhadap capaian target pembangunan, karena hakikat pembangunan yang menyeluruh membutuhkan peran serta seluruh elemen didalamnya khususnya bagaimana cara Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan strategi, tujuan dan rencana pembangunan serta menyerap segala aspirasi masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan itu sendiriVisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merupakan cerminan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Bandar Lampung. Untuk menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang memiliki peran yang kuat, banyak aspek yang menjadi perhatian sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika sehingga menjadi lokomotif pembangunan di kota Bandar Lampung.

Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut:

**“BANDAR LAMPUNG  
SEHAT,CERDAS,BERIMAN,BERBUDAYA,NYAMAN,UNGGUL BERDAYA  
SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**BANDAR LAMPUNG** :

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

**SEHAT** :

Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

**CERDAS** :

Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

**BERIMAN** :

Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwah, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhhlak mulia.

**BERBUDAYA** :

Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

**NYAMAN** :

Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

**UNGGUL** :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

**BERDAYA SAING** :

Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah

pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

**EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN :**

Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan Yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan tersebut, maka isi pembangunan Kota Bandar Lampung dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik ,bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistemlingkunganperkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

**MISI PERTAMA:**

Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah,murah,terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

**MISI KEDUA :**

Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

**MISI KETIGA :**

Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

**MISI KEEMPAT:**

Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

**MISI KELIMA:**

Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

**MISI KEENAM:**

Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata

Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalamrangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengansistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik,bersih,berwibawa,dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.

#### MISI KETUJUH:

Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat,sejuk,bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan,dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Ditinjau dari sisi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang menangani urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian daerah, maka secara umum tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Walikota dan Wakil Walikota,namun secara khusus,tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian **Misi ke-6** yaitu "***Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,pemerintahan yang baik dan bersih,berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,berwibawa,dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi***".

Berdasarkan penjabaran misi 6 tersebut, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan yaitu "***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif***",dengan Sasaran yaitu

**Terciptanya Inovasi Layanan Publik, dan Strategi yaitu *Meningkatkan Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan.***

Beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung**

PENGHAMBAT	PENDORONG
<b><i>MISI6: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.</i></b>	
PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya kebijakan, Sinkronisasi Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah	Tuntutan konsistensi antara Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah
Belum optimalnya koordinasi kelembagaan	Mengoptimalkan koordinasi kelembagaan
Belum optimalnya terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan publik	Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan publik dan saling terintegrasi satu sama lainnya
Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan	Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat
Reformasi struktural menjadi fungsional menuntut kompetensi Sumber Daya Manusia untuk lebih ditingkatkan lagi	Kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kementerian lainnya guna mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi	Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau
Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation	Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center

center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien	dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi)	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi)
Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah	Sinkronisasi Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah sehingga perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah dapat dihilangkan
Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan Satu Data	Sudah dilakukan koordinasi Kelembagaan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan BPS
Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Melakukan Pendataan Ulang pada Penyelenggaraan POSTELSUS dan Penyiaran
Belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah	Mengoptimalkan pengamanan terhadap sistem sandi daerah

## 2. Strategi Arah Kebijakan, dan program RPJMD Sesuai Dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

Pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo Kota Bandar Lampung masuk kedalam Misi 6 dengan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan pembangunan, serta program yang termuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Tujuan,Sasaran,Strategid dan Kebijakan**

**VISI**

***Bandar Lampung Sehat,Cerdas,Beriman,Berbudaya,Nyaman,Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat***

**MISI 6**

***Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,pemerintahan yang baik dan bersih,berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik,bersih,berwibawa,dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi***

NO.		TUJUAN		SASARAN		STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN
1	6.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien ,Akuntabel Transparan dan Inovatif	6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1	Meningkatkan kualitas Perencanaan, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1	Meningkatkan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Konsistensi
							2	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
							3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
							4	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah serta Kepatuhan terhadap Laporan Keuangan

			6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1	Meningkatnya Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan	1	Mengembangkan E-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
							2	Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika
							3	Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang
							4	Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah
							5	Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Bandar Lampung serta RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kantor menyatu dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal manayang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien.
2. Memiliki infrastruktur TIK yang handal, memiliki data center dan command center;
3. Sumberdaya aparatur memiliki kompetensi yang memadai;
4. Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidangurusan komunikasi dan informatika di daerah;
5. Ketersediaan anggaran yang proporsional dan memadai;
6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan,
7. Kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi);

Menilik dari tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, diproyeksikan ke depan bahwa Diskominfo Kota Bandar Lampung menjadi pusat unggulan dan memiliki posisi serta peran penting bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal menjalankan:

1. Fungsi Diseminasi Informasi, sebagai pusat penyebaran informasi dari Pemerintah Kota berkaitan dengan kebijakan, peraturan perundang-undangan, program kerja, target dan pencapaian hasil pembangunan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Penyerapan Aspirasi Publik, sebagai salah satu Satuan Kerja yang dapat secara optimal menyerap segala hal berkaitan dengan aspirasi publik lewat program dan kegiatan serta pemanfaatan TIK.

3. Fungsi pelayanan berbasis TIK dengan implementasi pelaksanaan E-Government untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Fungsi pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah di bidang pemanfaatan TIK.
5. Fungsi kemitraan dengan badan usaha, komunitas profesi dan praktisi di bidang pos,telekomunikasi dan informatika agar terjadi sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
6. Fungsi katalis dan penunjang pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pemanfaatan TIK.
7. Fungsi penggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan kewenangan dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan aturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Demi mewujudkan Kota Banda Lampung menjadi Kota ***Bandar Lampung Sehat,Cerdas,Beriman,Berbudaya,Nyaman,Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat*** sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 di atas, Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bandar Lampung mengangkat beberapa isu strategis bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang dirumuskan melalui kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (*Strength-Weakness Opportunity-Threat / SWOT*).

**Tabel 2.3.**  
**Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman**  
**(Strength-Weakness Opportunity-Threat / SWOT)**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung**

<b>Analisis Lingkungan Internal ( ALI )</b>	<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
	<b>Analisis Lingkungan Eksternal ( ALE )</b>	
<b>Peluang (Oportunity)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan perekonomian di daerah.</li> <li>Pusat pendidikan, perekonomian dan perdagangan yang semakin luas dan kota jasa.</li> <li>Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah.</li> </ul>	<b>Strategi (S – O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspirasi mendorong pengembangan kota jasa yang profesional.</li> <li>Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian.</li> <li>Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar minimal dalam meningkatkan kepuasan publik.</li> </ul>	<b>Strategi (W – O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.</li> <li>Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsive dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas.</li> <li>Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung pengembangan kota jasa yang kompetitif.</li> </ul>
<b>Ancaman (Threat)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok</li> <li>Krisis keuangan global.</li> <li>Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.</li> <li>Perbankan belum</li> </ul>	<b>Strategi (S – T)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah,</li> </ul>	<b>Strategi (W – T)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan manajemen layanan publik berbasis reinventing government.</li> <li>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</li> </ul>

<p>menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan luas lahan terbuka hijau.</li> </ul>	<p>penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan</li> </ul>	
---	--	--

### 3. Telaahan Renstra K/L Komunikasi dan Informatik

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan. Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemenkominfo selama 5 (lima) tahun ke depan yakni viii tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional. Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi

publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks. Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah : 1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi; 2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional; 3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif; 4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik; 5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan 6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengoreksiasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan

Indonesia Digital 2020–2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk: 1) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; 2) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; 3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); dan 4) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce). Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung 7 percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kemenkominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

#### 4. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah: "**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**". Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6(enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang tertuang dalam misi ke 2 yaitu "Mewujudkan "Good Governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik", yang secara khusus mendukung agenda kerja "Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation. Dan juga mendukung agenda kerja "smart school: pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan" sebagai perwujudan misi ke-3 yaitu: "meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Diskominfotik

juga turut mendukung misi ke-4 yaitu: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, dengan agenda kerja Infrastruktur Lampung Berjaya: konektivitas antar Kabupaten/ Kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi, dan agenda kerja Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan infrastruktur: berbasis peran warga dan pemanfaatan IT.

Untuk mewujudkan misi diatas maka Dinas Kominfo merumuskan 4 Program Prioritas yaitu: Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.4.**  
**Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung dan Renstra K/L**

Indikator Kinerja	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L		
		KOMINFO	BSSN	BPS
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya kualitas implementasi egovernment	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien diseluruh wilayah Indonesia	Terwujudnya tatakelola kemanan informasi yang komprehensif dan implementatif	
		Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Meningkatnya kompetensi dan kinerja SDM dibidang keamanan informasi yang berorientasi pada kesiapan pelaksanaan layanan keamanan informasi secara mandiri	

Persentase OPD Provinsi Lampung yang memenuhi standar layanan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif	Terwujudnya layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna	
Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang update	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral			Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem

**Tabel 2.5.**  
**Tantangan dan Peluang Dinas Kominfotik Provinsi Lampung**

TANTANGAN	PELUANG
Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo dan statistik
Kesenjangan informasi di masyarakat	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
Pesatnya perkembangan TIK	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata	Kebutuhan pengembangan muatan eGovernment
Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
Penyajian data statistik sektoral yang akurat dan akuntabel	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang kominfo dan statistik
	Tersedianya layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektora

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, serta pemanfaatan informasi dan teknologi, klasifikasi informasi melalui persandian, dan pengolahan data statistik sektoral. Permasalahan secara umum yang terjadi

pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Masih rendahnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan.
2. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi eGovernment meskipun kelembagaan sudah terbentuk, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala.
3. Kurangnya pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang menjunjung nilai-nilai budaya.
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan .
5. Belum optimalnya data sektoral yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, dan masih kurangnya database sektoral serta pengamanan data dengan usaha klasifikasi informasi.

Demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera) sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mengangkat beberapa isu strategis bidang komunikasi, informatika dan statistik adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Provinsi Lampung dengan peran seluruh Perangkat Daerah dengan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai koordinator;
2. Perlunya penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Lampung pada semua Perangkat Daerah;
3. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Percepatan pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Lampung melalui penerapan seluruh aplikasi yang telah disiapkan
5. Peningkatan penyediaan layanan informasi website online yang up to date

secara terkoordinasi sehingga domain masing-masing Perangkat Daerah akan berada di bawah domain www.lampungprov.go.id;

6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal;
7. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
8. Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
9. Menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat;
10. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan

Dengan mendasarkan kepada : modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005- 2025; maka Visi Provinsi Lampung 2005-2025 adalah : “**LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025**” Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum). Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005- 2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut 1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global. 2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. 5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari. 6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global 2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial 3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial 4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah 5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari 6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis 7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Tahapan Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 adalah: 1. RPJM Kesatu (2005 – 2009) 2. RPJM Kedua (2010 – 2014) 3. RPJM Ketiga (2015 – 2019) 4. RPJM Keempat (2020 – 2024)

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : "Rakyat Lampung Berjaya". Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tenram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenram tanpa ada gangguan dan tekanan

dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja. 2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan. 3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global. 4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut : 1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai. 2. Misi-2: Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. 3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. 4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. 5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. 6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

## 5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 5.1 Analisis Lingkungan Internal (ALI)

#### 5.1.1 Kekuatan (*Strength / S*)

##### 1) Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, hal ini menunjukan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### 2) Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif

Adanya Kepemimpinan Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas serta mobilitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi, juga memiliki kemampuan membangun *Partner Aliansi Strategic* dengan berbagai lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga Non Pemerintah (NGO) atau LSM.

#### 5.1.2 Kelemahan (*Weakness/W*)

##### 1) Kompeten aparatur di bidang IT masih belum memadainya

Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung cukup memadai hal ini dapat dilihat dari

komposisi golongan, pangkat dan eselonisasi jabatan serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat akan bisa dicapai. Dan banyaknya jumlah pegawai yang mengisi jabatan fungsional mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangun birokrasinya lebih berorientasi kepada kekuatan keahlian (*Expert Power*).

**2) Kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik.**

Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor. Hal ini terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah kepada penerapan konsep “One-Stop Service” karena memang dalam pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-belit dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap serta biaya pelayanan yang tidak pasti.

**3) Sarana dan prasarana Sarana Komunikasi dan Informatika belum memadai**

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di negara kita kian merambah ke berbagai sektor, termasuk diantaranya pada sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Begitu pula di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang secara bertahap mulai diterapkan teknologi informasi di berbagai bidang pemerintahan terutama pada bidang pengelolaan keuangan serta beberapa pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut sangat memudahkan pengembangan aplikasi *electronic government* (e-gov) pada Pemerintah Kota

Bandar Lampung. Salah satu sarana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dibangunnya akses internet area publik di beberapa titik yang tersebat di seluruh Kota Bandar Lampung sebagai upaya penyediaan layanan internet gratis masyarakat serta sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat

- 4) **Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi.**

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Proses globalisasi yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap aspek kehidupan, yang juga dirasakan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Di era globalisasi ini, tidak menguasai teknologi informasi identik dengan buta huruf. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi harus diperkenalkan secara luas agar masyarakat mempunyai bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk bisa menerapkan dan menggunakannya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan juga bersaing dalam lingkup global.

## 5.2 Analisis Lingkungan Ekternal (ALE)

### 6.2.1 Peluang (*Opportunities / O*)

- 1) **Pusat pendidikan, perekonomian dan perdagangan yang semakin luas dan kota jasa.**

Bandar Lampung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena Kota Bandarlampung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup

dikenal baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional seperti UNILA, ITERA, IAIN Radin Inten, Univeditas Bandar Lampung, Universitas Dahmajaya. Universitas Tulang Bawang, Universitas Saburai, Universitas Muhammadiyah, Universitas Teknokrat serta perguruan tinggi swasta lainnya, sehingga Kota Bandarlampung berpotensi untuk dikembangkan sebagai *center of excellence* atau pusat keunggulan di bidang SDM, selain itu pula, Kota Bandarlampung memiliki tempat pendidikan dan latihan di berbagai bidang, pusat pemasaran home industry, pelabuhan ekspor impor serta kegiatan perekonomian strategis lainnya telah mendorong Kota Bandarlampung posisinya sebagai kota jasa (*service city*). Banyaknya pusat perdagangan dan wisata kuliner yang merupakan unggulan karena mengundang minat pendatang baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung untuk menghabiskan khususnya waktu akhir pekan yang memberikan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Kota Bandarlampung.

**2) Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang kepada Pemerintah Daerah.**

Adanya pelimpahan urusan/kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian

detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya.

#### **6.2.2 Ancaman**

**1) Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok.**

Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraaan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.

**2) Krisis keuangan global.**

Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi

perekonomian di Kota Bandarlampung sebagai kota jasa.

**3) Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.**

Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial, diantaranya meningkatnya jumlah pencari kerja yang semakin meningkat.

**4) Perbankan belum menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM.**

Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar.

**5) Penurunan luas lahan terbuka hijau.**

Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandar Lampung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (*global warming*).

### **6.2.3 Faktor Pendorong Keberhasilan**

Atas dasar tersebut maka faktor kunci keberhasilan adalah untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju Kota Bandar Lampung sebagai kota jasa yang bermartabat diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Diskominfo dan seluruh untuk merealisasi komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

1. Kemitraan yang kuat dari seluruh aparatur Diskominfo untuk membangun kualitas pusat pelayanan Informasi.
2. Kerjasama yang harmonis dengan berbagai media massa dan lembaga lembaga koalisi masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat. Adanya penyebaran Informasi guna mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Adanya dukungan sarana Informasi ( surat kabar, radio dan TV ) sebagai media Komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kota.
4. Tersedianya kualitas SDM di bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikuti sertaikan pegawai dalam diklat
5. Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.

#### 6.2.4 Penentuan Isu

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perludikembangkan strategi sebagai berikut :

##### 1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- 1) Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspirasi mendorong pengembangan kota jasa yang profesional.
- 2) Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian.
- 3) Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

##### 2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- 1) Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
- 2) Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan

### **3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)**

- 1) Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- 2) Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsive dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas.
- 3) Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung pengembangan kota jasa yang kompetitif.

### **4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)**

- 1) Perbaikan manajemen layanan publik berbasis reinventing government.
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD yang akan ditangani pada Renstra OPD kabupaten/kota periode berikutnya. Jika Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

#### **1. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra OPD provinsi;**

Kondisi saat ini yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang Komunikasi dan Informatika dapat diidentifikasi ke dalam beberapa hal berikut:

- 1) Kebijakan tentang rencana induk pembangunan dan pengembangan e-government.
- 2) Kebijakan tentang pengelolaan data dan informasi elektronik.
- 3) Kebijakan tentang diseminasi informasi.
- 4) Kebijakan tentang pengelolaan informasi publik.
- 5) Kebijakan yang berkaitan tentang penyelenggaraan pos.
- 6) Kebijakan yang berkaitan tentang penyelenggaraan telekomunikasi.

## **2. Tujuan dan sasaran;**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur program kerja dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

## **3. Strategi dan kebijakan;**

Kota Bandar Lampung hingga saat ini belum memiliki instrumen kebijakan yang cukup untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berkenaan dengan kewenangannya di bidang Komunikasi dan Informatika.Instrumen kebijakan yang diperlukan adalah :

- 1) Kebijakan tentang rencana induk pembangunan dan pengembangan e-government.
- 2) Kebijakan tentang pengelolaan data dan informasi elektronik.

- 3) Kebijakan tentang diseminasi informasi.
- 4) Kebijakan tentang pengelolaan informasi publik.
- 5) Kebijakan yang berkaitan tentang penyelenggaraan pos.
- 6) Kebijakan yang berkaitan tentang penyelenggaraan telekomunikasi.

**Tabel 2.6**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung**

NO.		TUJUAN		SASARAN		STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja pada Tahun	
								Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)
1	6.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien ,Akuntabel Transparan dan Inovatif	6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1	Meningkatkan kualitas Perencanaan, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah	T	ST
			6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1	Meningkatnya Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	100,00	100,00

Tabel 2.7.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<b>IKU</b>											
<b>1.KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
1	Persentase Informasi Penyeleenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95	95	95	95	95	95	95	95	
2	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80	80	85	85	90	100	100	100	
3	Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik	Persen	90	90	95	95	95	95	95	95	
<b>2.STATISTIK</b>											

4	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada							
---	---	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>IKK</b>										
<b>1.PERSANDIAN</b>										
1	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang baik	Persen	80	85	95	95	95	95	95	95

## B. RENCANA KINERJA

Tabel 2.8. Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024

No.	Urusan Pemerintahan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / Target Kinerja		Realisasi Kinerja (%)
						Indikator Kinerja	Target Kinerja	
	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91%	91%
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan

					Kinerja SKPD			
					<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	12 Bulan	12 Bulan
					<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>

					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	100%	79%
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan

					Konsultasi SKPD			
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	100%	100%
					Pengadaan Perlalatan dan Mesin Lainnya		12 Bulan	12 Bulan
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100%	96%
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	96%
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	100%	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan	12 Bulan	12 Bulan

					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	100%	78%
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi</b>	100%	87%	

		Transparansi dan Inovatif						
					Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	87%
					Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	12 Bulan	12 Bulan
					Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan
					<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>58%</b>

					<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	18%
					<b>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengedalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)</b>	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan

					Daerah Provinsi			
					Sub Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintergrasi Jumlah Jenis Data Base	100%	58%
	<b>URUSAN STATISTIK</b>				<b>PROGRAM PENYELENGRAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah</b>	<b>Ada</b>	<b>Ada</b>
					Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	p dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Tersedianya Literasi Data dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	12 Bulan	12 Bulan

	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik</b>	<b>100%</b>	<b>74%</b>
					Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	<b>100%</b>	<b>74%</b>
					Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah/Kota	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran	12 Bulan	12 Bulan
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengebangunan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	12 Bulan	12 Bulan

					<p>Sub Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Peneglokalan Call Center dan Persandian</p>	12 Bulan	12 Bulan
--	--	--	--	--	---	---	----------	----------

### C. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program dengan 12 (duabelas) kegiatan pendukung 31 (Tiga puluh Satu) Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran setelah perubahan (APBDP-TA.2024) sebesar 14.995.629.638,00 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
				Jumlah	%
1.	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>15.019.629.638,00</b>	<b>12.246.223.011,00</b>	<b>2.773.406.627,00</b>	<b>18,47</b>
1.1.	Belanja Operasi	13.529.528.737,00	12.071.023.011,00	1.458.505.726,00	<b>10,78</b>
	Belanja Pegawai	3.818.584.298,00	3.496.915.068,00	321.669.230,00	<b>8,42</b>
	Belanja Barang dan Jasa	9.710.944.439,00	8.574.107.943,00	1.136.836.496,00	<b>11,71</b>
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.	Belanja Modal	1.490.100.901,00	175.200.000,00	1.314.900.901,00	<b>88,24</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.490.100.901,00	175.200.000,00	1.314.900.901,00	<b>88,24</b>
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>14.995.629.638,00</b>	<b>12.246.223.011,00</b>	<b>2.749.406.627,00</b>	<b>18,33</b>
<b>Surplus /Defisit</b>		<b>15.019.629.638,00</b>	<b>12.246.223.011,00</b>	<b>2.773.406.627,00</b>	<b>18,47</b>
3.	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Daerah Netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sisa Lebih Pembayaran Anggaran</b>		<b>-15.019.629.638,00</b>	<b>-12.246.223.011,00</b>	<b>-2.773.406.627,00</b>	<b>18,47</b>

Mekanisme pergeseran/perubahan DPA melalui perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah APBD Perubahan.

**Tabel.2.9**  
**Perubahan Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024**

No.	Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Murni	Perubahan	Realisasi Perubahan	% Realisasi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100	9=8-7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	10.861.369.298,00	14.995.629.638,00	12.246.223.011,00	82	2.749.406.627,00
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	10.512.137.428,00	14.627.432.768,00	11.959.603.048,00	82	2.667.829.720,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	5.825.431.354,00	5.347.621.323,00	4.895.436.887,00	92	452.184.436,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	91%	91%	60.000.000,00	24.000.000,00	21.846.410,00	91	2.153.590,00	

			<b>Perangkat Daerah</b>							
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	12.000.000,00	11.868.160,00	99	131.840,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	12.000.000,00	9.978.250,00	83	2.021.750,00
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel</b>	100%	92%	<b>4.424.583.337,00</b>	<b>3.839.483.337,00</b>	<b>3.517.553.068,00</b>	92	<b>321.930.269,00</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	4.167.784.298,00	3.591.784.298,00	3.279.145.068,00	91	312.639.230,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	226.800.000,00	226.800.000,00	217.770.000,00	96	9.030.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	12 Bulan	12 Bulan	29.999.039,00	20.899.039,00	20.638.000,00	99	261.039,00
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	98%	95%	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	3	<b>14.500.000,00</b>
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	500.000,00	3	14.500.000,00

		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>79%</b>	<b>117.798.017,00</b>	<b>183.898.386,00</b>	<b>144.362.854,00</b>	<b>79</b>	<b>39.535.532,00</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	29.998.479,00	38.503.178,00	38.045.600,00	99	457.578,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	14.990.045,00	22.265.715,00	22.075.700,00	99	190.015,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	3.430.000,00	10	31.570.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	9.999.954,00	15.219.954,00	14.761.640,00	97	458.314,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	0,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	21.809.539,00	66.909.539,00	60.049.914,00	90	6.859.625,00
		Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>75.189.600,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>139</b>	<b>-29.010.400,00</b>
		Pengadaan Perlalatan Mesin Lainnya		12 bulan	12 Bulan	0,00	75.189.600,00	104.200.000,00	139	-29.010.400,00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	100%	100%	0	0,00	0,00	0	0,00

		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel	12 Bulan	12 Bulan	0	0,00	0,00	0	0,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100%	96%	768.000.000,00	768.000.000,00	760.000.000,00	99	8.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100	0,00
		Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	744.000.000,00	744.000.000,00	736.000.000,00	99	8.000.000,00
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	100%	78%	440.050.000,00	442.050.000,00	346.974.555,00	78	95.075.445,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	42.430.000,00	42.430.000,00	37.489.000,00	88	4.941.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	41.620.000,00	41.620.000,00	33.445.555,00	80	8.174.445,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	56.000.000,00	56.000.000,00	14.300.000,00	26	41.700.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12 Bulan	12 Bulan	300.000.000,00	302.000.000,00	261.740.000,00	87	40.260.000,00

		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>	<b>2.957.319.174,00</b>	<b>5.860.513.244,00</b>	<b>5.071.860.920,00</b>	<b>87</b>	<b>788.652.324,00</b>
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	87%	2.957.319.174,00	5.860.513.244,00	5.071.860.920,00	87	788.652.324,00
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	1.248.500.000,00	2.865.194.070,00	2.850.183.184,00	99	15.010.886,00
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	12 Bulan	12 Bulan	47.000.000,00	47.000.000,00	26.995.227,00	57	20.004.773,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.661.819.174,00	2.948.319.174,00	2.194.682.509,00	74	753.636.665,00
		<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>58%</b>	<b>1.729.386.900,00</b>	<b>3.419.298.201,00</b>	<b>1.992.305.241,00</b>	<b>58</b>	<b>1.426.992.960,00</b>
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area	100%	93%	1.537.534.708,00	1.837.534.708,00	1.704.349.492,00	93	133.185.216,00

		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Publik						
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	12 Bulan	12 Bulan	1.537.534.708,00	1.837.534.708,00	1.704.349.492,00	93  <b>133.185.216,00</b>
		Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengedalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	18%	<b>191.852.192,00</b>	<b>1.581.763.493,00</b>	<b>287.955.749,00</b>	18  <b>1.293.807.744,00</b>
		Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	109.996.900,00	133.996.900,00	131.630.750,00	98  2.366.150,00
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	81.855.292,00	1.447.766.593,00	156.324.999,00	11  <b>1.291.441.594,00</b>
URUSAN STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada		<b>181.598.645,00</b>	<b>205.363.645,00</b>	<b>166.458.691,00</b>	81  <b>38.904.954,00</b>
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada	<b>181.598.645,00</b>	<b>205.363.645,00</b>	<b>166.458.691,00</b>	81  38.904.954,00
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Tersedianya Literasi Data dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0  15.000.000,00

		Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	106.598.645,00	106.598.645,00	98.764.091,00	93	7.834.554,00
		Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000,00	83.765.000,00	67.694.600,00	81	16.070.400,00
	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentasae Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik</b>	<b>100%</b>	<b>74%</b>	<b>167.633.225,00</b>	<b>162.833.225,00</b>	<b>120.161.272,00</b>	<b>74</b>	<b>42.671.953,00</b>
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran	12 bulan	12 Bulan	69.996.679,00	69.996.679,00	60.905.572,00	87	9.091.107,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengebangunan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	12 Bulan	12 Bulan	37.641.601,00	32.841.601,00	838.000,00	3	32.003.601,00
		Sub Kebijakan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Peneglolaan Call Center dan Persandian	12 Bulan	12 Bulan	59.994.945,00	59.994.945,00	58.417.700,00	97	1.577.245,00
JUMLAH					<b>10.861.369.298,00</b>	<b>14.995.629.638,00</b>	<b>12.246.223.011,00</b>	<b>82</b>	<b>2.749.406.627,00</b>	

#### **D. REALISASI ANGGARAN**

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melaksanakan 5 (lima) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan di Urusan Komunikasi dan Informatika, 1 (satu ) Sub Kegiatan di Urusan Statistik dan 1 (satu) Sub Kegiatan di Urusan Persandian.

**Tabel 2.10**  
**Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Bandar Lampung Tahun 2023**

No.	Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Murni	Perubahan	Realisasi Perubahan	% Realisasi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100	9=8-7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	10.861.369.298,00	14.995.629.638,00	12.246.223.011,00	82	2.749.406.627,00
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	10.512.137.428,00	14.627.432.768,00	11.959.603.048,00	82	2.667.829.720,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	5.825.431.354,00	5.347.621.323,00	4.895.436.887,00	92	452.184.436,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91%	91%	60.000.000,00	24.000.000,00	21.846.410,00	91	2.153.590,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	12.000.000,00	11.868.160,00	99	131.840,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Tersedianya Penyusunan Laporan	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	12.000.000,00	9.978.250,00	83	2.021.750,00	

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100%	92%	4.424.583.337,00	3.839.483.337,00	3.517.553.068,00	92	321.930.269,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	4.167.784.298,00	3.591.784.298,00	3.279.145.068,00	91	312.639.230,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	226.800.000,00	226.800.000,00	217.770.000,00	96	9.030.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	12 Bulan	12 Bulan	29.999.039,00	20.899.039,00	20.638.000,00	99	261.039,00
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98%	95%	15.000.000,00	15.000.000,00	500.000,00	3	14.500.000,00
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	500.000,00	3	14.500.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	100%	79%	117.798.017,00	183.898.386,00	144.362.854,00	79	39.535.532,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	29.998.479,00	38.503.178,00	38.045.600,00	99	457.578,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	14.990.045,00	22.265.715,00	22.075.700,00	99	190.015,00

		Kantor								
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	3.430.000,00	10	31.570.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	9.999.954,00	15.219.954,00	14.761.640,00	97	458.314,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	0,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	21.809.539,00	66.909.539,00	60.049.914,00	90	6.859.625,00
		Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	0	75.189.600,00	104.200.000,00	139	-29.010.400,00
		Pengadaan Perlalatan Mesin Lainnya		12 bulan	12 Bulan	0,00	75.189.600,00	104.200.000,00	139	-29.010.400,00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	100%	100%	0	0,00	0,00	0	0,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel	12 Bulan	12 Bulan	0	0,00	0,00	0	0,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100%	96%	768.000.000,00	768.000.000,00	760.000.000,00	99	8.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100	0,00

		Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	744.000.000,00	744.000.000,00	736.000.000,00	99	8.000.000,00
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	100%	78%	440.050.000,00	442.050.000,00	346.974.555,00	78	95.075.445,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	42.430.000,00	42.430.000,00	37.489.000,00	88	4.941.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	41.620.000,00	41.620.000,00	33.445.555,00	80	8.174.445,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	56.000.000,00	56.000.000,00	14.300.000,00	26	41.700.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12 Bulan	12 Bulan	300.000.000,00	302.000.000,00	261.740.000,00	87	40.260.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	100%	87%	2.957.319.174,00	5.860.513.244,00	5.071.860.920,00	87	788.652.324,00

			yang Terpublikasi							
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	87%	2.957.319.174,00	5.860.513.244,00	5.071.860.920,00	87	788.652.324,00
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	1.248.500.000,00	2.865.194.070,00	2.850.183.184,00	99	15.010.886,00
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	12 Bulan	12 Bulan	47.000.000,00	47.000.000,00	26.995.227,00	57	20.004.773,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.661.819.174,00	2.948.319.174,00	2.194.682.509,00	74	753.636.665,00
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	100%	58%	1.729.386.900,00	3.419.298.201,00	1.992.305.241,00	58	1.426.992.960,00
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	93%	1.537.534.708,00	1.837.534.708,00	1.704.349.492,00	93	133.185.216,00

		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	12 Bulan	12 Bulan	1.537.534.708,00	1.837.534.708,00	1.704.349.492,00	93	<b>133.185.216,00</b>
		Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Percentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengedalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	18%	191.852.192,00	1.581.763.493,00	287.955.749,00	18	<b>1.293.807.744,00</b>
		Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	109.996.900,00	133.996.900,00	131.630.750,00	98	<b>2.366.150,00</b>
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	81.855.292,00	1.447.766.593,00	156.324.999,00	11	<b>1.291.441.594,00</b>
	<b>URUSAN STATISTIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada	<b>181.598.645,00</b>	<b>205.363.645,00</b>	<b>166.458.691,00</b>	81	<b>38.904.954,00</b>
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada	<b>181.598.645,00</b>	<b>205.363.645,00</b>	<b>166.458.691,00</b>	81	<b>38.904.954,00</b>
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Tersedianya Literasi Data dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0	15.000.000,00

		Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	106.598.645,00	106.598.645,00	98.764.091,00	93	7.834.554,00
		Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000,00	83.765.000,00	67.694.600,00	81	16.070.400,00
	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentasae Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik</b>	<b>100%</b>	<b>74%</b>	<b>167.633.225,00</b>	<b>162.833.225,00</b>	<b>120.161.272,00</b>	<b>74</b>	<b>42.671.953,00</b>
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran	12 bulan	12 Bulan	69.996.679,00	69.996.679,00	60.905.572,00	87	9.091.107,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Percentase Pengebangan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	12 Bulan	12 Bulan	37.641.601,00	32.841.601,00	838.000,00	3	32.003.601,00
		Sub Kebijakan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Penegolahaan Call Center dan Persandian	12 Bulan	12 Bulan	59.994.945,00	59.994.945,00	58.417.700,00	97	1.577.245,00
<b>JUMLAH</b>					<b>10.861.369.298,00</b>	<b>14.995.629.638,00</b>	<b>12.246.223.011,00</b>	<b>82</b>	<b>2.749.406.627,00</b>	

**Tabel 2.11**  
**GAMBARAN TAPKIN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kebijakan (Secara Keseluruhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran
1.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terbangunnya Infrastruktur Telekomunikasi Terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	5.347.621.323,00
					Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Serat Optik dalam Gedung, Antar Gedung dan dalam Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telah dilaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91%	91%	24.000.000,00
					Tersedianya Akses Informasi Melalui Internet di Setiap SKPD di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00
					Tersedianya Akses Internet Gratis Bagi Publik	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00
					Tersedianya Pusat Data dan Informasi (Data Center)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100%	92%	3.839.483.337,00
					Tersedianya Pusat Monitoring dan Kendali (Command Center)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	3.591.784.298,00
					Tersedianya Sistem Administrasi Lesspaper Dalam Administrasi Penyelenggaraan Urusan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	226.000.000,00

					Pemerintahan					
					Tersedianya Sistem Komunikasi Berbasis TIK Seperti E-Mail, Mobile Instant Messenger dll.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	12 Bulan	12 Bulan	20.899.039,00
					Meningkatkan Ketersediaan Website SKPD	Kegiatan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	98%	95%	15.000.000,00
					Pengaturan Domain dan Subdomain	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00
					Tersedianya Sistem Informasi Berbasis TIK untuk Pelayanan Publik.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	100%	79%	183.898.386,00
					Tersedianya Sistem Monitoring Kota dengan Pemanfaatan TIK	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	38.503.178,00
					Tersedianya Sistem Informasi berbasis TIK yang dapat Menunjang Pelayanan Publik	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	22.265.715,00
					Tersedianya Sistem Informasi Terpadu Tentang Kota Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000,00
					Tersedianya Database yang Lengkap Tentang Potensi Daerah di Berbagai Sektor (Pariwisata, Jasa dan Perdagangan)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	15.219.954,00
					Tumbuhnya Ekonomi Kreatif di Bidang Komunikasi dan Informatika	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	6000.000,00

					Mendorong Pengembangan E-Commerce	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	66.909.539,00	
					Tersedianya Sistem Informasi yang dapat Mendorong Peningkatan PAD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	100%	100%	75.189.600,00	
					Peningkata Metode kerja Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Pengadaan Perlalatan dan Mesin Lainnya		12 Bulan	12 Bulan	75.189.600,00	
					Tersusunnya Pola Pengelolaan Data dan Informasi yang Aman, Efektif dan Efisien	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100%	96%	768.000.000,00	
					Terjalinnya Kemitraan Mutualisme dengan Media Massa dalam Diseminasi Informasi	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000,00	
					Tersedianya Konten Informasi Pembangunan Daerah Baik dalam Format Digital Atau Cetak (Teks, Gambar dan Video)	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	96%	744.000.000,00	
					Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Media Informasi Publik (Elektronik, Luar Ruang, Cetak dan Online)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	100%	100%	442.050.000,00	
					Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	42.430.000,00	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi yang Handal	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	100%	78%	41.620.000,00	

					Tersedianya Regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi Sesuai Peraturan Perundungan	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	56.000.000,00
					Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	302.000.000,00	
2.		Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	Terbangunnya Pusat Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	100%	87%	5.860.513.244,00
					Terlaksananya Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Keahlian ASN	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	87%	5.860.513.244,00
					Terlaksananya Sosialisasi Danedukasi Tentang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	2.865.194.070,00
						Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	12 Bulan	12 Bulan	47.000.000,00
						Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.948.319.174,00
3.						<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	100%	58%	3.419.298.201,00
						Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	12 Bulan	12 Bulan	1.837.534.708,00
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	18%	1.837.534.708,00

							Daerah				
							Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Percentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengedalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	12 Bulan	12 Bulan	1.581.763.493,00
							Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	133.996.900,00
							Sub Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasi Jumlah Jenis Data Base	100%	58%	1.447.766.593,00
4.	URUSAN STATISTIK						PROGRAM PENYELENGRAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada	205.363.645,00
							Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	p dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada	205.363.645,00
							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Tersedianya Literasi Data dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00
							Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	106.598.645,00
							Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	83.765.000,00
5.	URUSAN PERSANDIAN						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Percentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	100%	74%	162.833.225,00
							Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%	74%	162.833.225,00

						Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah/Kota	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran	12 Bulan	12 Bulan	69.996.679,00
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Percentase Pengebangan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	12 Bulan	12 Bulan	32.841.601,00
						Sub Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Peneglolaan Call Center dan Persandian	12 Bulan	12 Bulan	59.994.945,00
<b>JUMLAH PAGU</b>										<b>14.995.629.638,00</b>



### **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung mengelola Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar tugas kepala daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Didalam melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar tersebut, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melaksanakan :

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika	3	10	25
Urusan Statistik	1	1	3
Urusan Persandian	1	1	3
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>31</b>

#### **1. Rencana Program dan Kegiatan**

#### **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
  - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c. Sub Kegiatan Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD
- (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan Pengadaan Perlalatan Mesin Lainnya
- (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
  - b. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
  - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 3) Program Aplikasi Informatika
- (1) Kegiatan Pengelolaan Domain yang telah ditetetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Penyelenggraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - (2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
    - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
    - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

## URUSAN STATISTIK

### 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah
- b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
- c. Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur

## URUSAN PERSANDIAN

### 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- c. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi

## 2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program dengan 12 (duabelas) kegiatan pendukung 31 (Tiga puluh Satu) Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran setelah perubahan (APBDP-TA.2024) sebesar 14.995.629.638,00 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
				Jumlah	%
1.	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>15.019.629.638,00</b>	<b>12.246.223.011,00</b>	<b>2.773.406.627,00</b>	<b>18,47</b>
1.1.	Belanja Operasi	13.529.528.737,00	12.071.023.011,00	1.458.505.726,00	<b>10,78</b>
	Belanja Pegawai	3.818.584.298,00	3.496.915.068,00	321.669.230,00	<b>8,42</b>
	Belanja Barang dan Jasa	9.710.944.439,00	8.574.107.943,00	1.136.836.496,00	<b>11,71</b>
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.	Belanja Modal	1.490.100.901,00	175.200.000,00	1.314.900.901,00	<b>88,24</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.490.100.901,00	175.200.000,00	1.314.900.901,00	<b>88,24</b>
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>14.995.629.638,00</b>	<b>12.246.223.011,00</b>	<b>2.749.406.627,00</b>	<b>18,33</b>
<b>Surplus /Defisit</b>		<b>15.019.629.638,00</b>	<b>12.246.223.011,00</b>	<b>2.773.406.627,00</b>	<b>18,47</b>
3.	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Daerah Netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sisa Lebih Pembayaran Anggaran</b>		<b>-15.019.629.638,00</b>	<b>-12.246.223.011,00</b>	<b>-2.773.406.627,00</b>	<b>18,47</b>

### URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.5.421.621.323,00 terserap sebesar Rp.4.895.436.887,00 atau sebesar 90,00% didukung dengan 10 (Sepuluh) kegiatan, yaitu:

- 2) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.24.000.000,00 terserap sebesar Rp.21.846.410,00 atau sebesar 91%. Hasil yang dicapai adalah Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang dapat dipertanggung jawabkan berupa dokumen LPJ, LPPD dan LAKIP Tahun 2024 (realisasi kinerja 100%) dan Tersusunnya Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.12.000.000,00 terserap sebesar Rp.11.868.160,00 atau sebesar 99%. Hasil yang dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 99%).
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp 12.000.000,00 terserap sebesar Rp. 9.978.250,00 atau sebesar 83 %. Hasil yang dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang dapat dipertanggung jawabkan berupa dokumen LPJ, LPPD dan LAKIP Tahun 2023 (realisasi kinerja 100%).

- (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.839.483.337 terserap sebesar Rp.3.517.553.068,00 atau sebesar 92,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (realisasi kinerja 100%), dan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.539.584.298,00 terserap sebesar Rp.3.279.145.068,00 atau sebesar 91,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN (realisasi kinerja 100%).
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.225.000.000,00 terserap sebesar Rp.217.077.000,00 atau sebesar 97,00 %. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (realisasi kinerja 100%).
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.20.899.039,00 terserap sebesar Rp.20.638.000,00 atau sebesar 99,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (realisasi kinerja 100%).
- (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 terserap sebesar Rp.500.000,00 atau sebesar 3,00%. Hasil yang dicapai adalah terlatihnya jumlah pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan dukungan anggaran sebesar dengan dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000 terserap sebesar Rp. 500.000,00 atau sebesar 3,00%. Hasil yang dicapai adalah terlatihnya jumlah pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. (realisasi kinerja 95,00%).
- (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.183.898.386,00 terserap sebesar Rp.144.0362.854,00 atau sebesar 79,00%. Hasil yang dicapai

adalah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (realisasi kinerja 98%). Didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.38.503.178,00 terserap sebesar Rp.38.045.600,00 atau sebesar 99,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (realisasi kinerja 100%).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.265.715,00 terserap sebesar Rp.22.075.700,00 atau sebesar 99,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga SKPD (realisasi kinerja 100%).
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 terserap sebesar Rp.3.430.000,00 atau sebesar 10,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor (realisasi kinerja 100%).
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.15.219.954,00 terserap sebesar Rp.14.761.640,00 atau sebesar 97,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (realisasi kinerja 100%).
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 terserap sebesar Rp.6.000.000,00 dicapai adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (realisasi kinerja 100%).
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.66.909.539,00 terserap sebesar Rp.60.049.914,00 atau sebesar 90,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksaksanya Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD (realisasi kinerja 100%).

- (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.125.189.600,00 terserap sebesar Rp.104.200.000,00 atau sebesar 83,00%. Hasil yang dicapai adalah Kegiatan ini tidak terlaksana(realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 1(satu) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Perlalatan Mesin Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.125.189.600,00 terserap sebesar Rp.104.200.000,00 atau sebesar 83,00%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 100%).
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 792.000.000,00 terserap sebesar Rp.760.000.000,00 atau sebesar 96,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (realisasi kinerja 96%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.24.000.000,00 terserap sebesar Rp.24.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 100%).
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.768.000.000,00 terserap sebesar Rp.736.000.000,00 atau sebesar 96,00%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (realisasi kinerja 100%).
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.442.050.000,00 terserap sebesar Rp.346.974.555,00 atau sebesar 78,00%. Hasil yang dicapai adalah TerlaksananyaPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah (realisasi kinerja 78%). Didukung oleh 4 (Empat) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.42.430.000,00 terserap sebesar Rp.37.489.000,00 atau sebesar 88,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan (realisasi kinerja 88%).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.41.620.000,00 terserap sebesar Rp.33.445.555,00 atau sebesar 80,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan (realisasi kinerja 100%).
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.56.000.000,00 terserap sebesar Rp.14.300.000,00 atau sebesar 26,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (realisasi kinerja 100%).
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.302.000.000,00 terserap sebesar Rp.261.740.000,00 atau sebesar 87,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (realisasi kinerja 100%).

- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.810.513.244,00 terserap sebesar Rp.5.071.860.920,00 atau sebesar 87,00% didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan 3 (tiga) sub Kegiatan:
- a. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.865.194.070,00 terserap sebesar Rp.2.850.183.184,00 atau sebesar 99,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%).
  - b. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.47.000.000,00 terserap sebesar Rp.26.995.227,00 atau sebesar 57,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Sekretariat PPID (realisasi kinerja 100%).
  - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.939.245.00,00 terserap sebesar Rp.2.898.319.174,00 atau sebesar 76,00%. Hasil yang dicapai adalah adalah Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(realisasi kinerja 100%).
- 3) Program Aplikasi Informatika didukung dengan anggaran sebesar Rp3.419.298.201,00 terserap sebesar Rp.1.992.305.241,00 atau sebesar 58,00% didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
- (1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.837.534.708,00 terserap sebesar Rp.1.704.349.492,00 atau sebesar 93,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya koneksi jaringan internet lingkup sekretariat Pemkot dan area publik (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.837.534.708,00 terserap sebesar Rp.1.704.349.492,00 atau sebesar 93,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Area Publik dan Sekretariat Pemkot Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%).

- (2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.581.763.493,00 terserap sebesar Rp.287.955.749,00 atau sebesar 18,00%. Hasil yang dicapai adalah Persentase hosting dan maintenance sistem informasi pengendalian menara telekomunikasi SIDALMENTEL (realisasi kinerja 95%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.133.996.900,00 terserap sebesar Rp.131.630.750,00 atau sebesar 98,00%. Hasil yang dicapai adalah Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (realisasi kinerja 95%).
  - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.447.766.593,00 terserap sebesar Rp.156.324.999,00 atau sebesar 11,00%. Hasil yang dicapai adalah terwujudnya pengembangan dan pengelolaan data center (realisasi kinerja 90%).

## **URUSAN STATISTIK**

- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung dengan anggaran sebesar Rp.205.363.645,00 terserap sebesar Rp.166.458.691,00 atau sebesar 81,00% didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 3 (Tiga) sub Kegiatan:

- i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Meningkatkan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Literasi Data dan Informasi (realisasi kinerja 0%).
- ii. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan dukungan anggaran sebesar Rp.106.598.645,00 terserap sebesar Rp.98.764.091,00 atau sebesar 93,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Data Sektoral (realisasi kinerja 100%).
- iii. Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dengan dukungan anggaran sebesar Rp.83.765.000,00 terserap sebesar Rp.67.694.600,00 atau sebesar 81%. Hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya jumlah infrastruktur data dan informasi (realisasi kinerja 100%).

## **URUSAN PERSANDIAN**

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi didukung dengan anggaran sebesar Rp.162.833.225,00 terserap sebesar Rp.120.161.272,00 atau sebesar 74,00% didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:

- (1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.69.996.679,00 terserap sebesar Rp.60.905.572,00 atau sebesar 87,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang terkelola dengan baik.
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.32.841.601,00 terserap

sebesar Rp.838.000,00 atau sebesar 3,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 3,00%).

- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.59.994.945,00 terserap sebesar Rp.58.417.700,00 atau sebesar 97,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Cyber dan Keamanan Informasi Data Pemerintah Daerah (realisasi kinerja 97,00%).

**B. KEBIJAKAN STRATEGI YANG DITETAPKAN****C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel3.1

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024

No.	Urusan Pemerintahan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kebijakan (Secara Keseluruhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomenda si DPRD
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Terbangunnya Infrastruktur Telekomunikasi Terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	95%	1. Tidak sesuainya rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget 2. Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi Akibat Covid 19)	1. Penetapan cash budget disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan 2. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi	
					2 Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Serat Optik dalam Gedung, Antar Gedung dan dalam Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98%	95%	-	-	-
					3 Tersedianya Akses Informasi Melalui Internet di Setiap SKPD di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					4 Tersedianya Akses Internet Gratis Bagi Publik	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					5 Tersedianya Pusat Data dan	Kegiatan Administrasi	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen	98%	95%	-	-	-

						Informasi (Data Center)	Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel					
					6	Tersedianya Pusat Monitoring dan Kendali (Command Center)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					7	Tersedianya Sistem Administrasi Lesspaper Dalam Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					8	Tersedianya Sistem Komunikasi Berbasis TIK Seperti E-Mail, Mobile Instant Messenger dll.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					9	Meningkatkan Ketersediaan Website SKPD	Kegiatan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	98%	95%	-	-	-
					10	Pengaturan Domain dan Subdomain	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlalihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					11	Tersedianya Sistem Informasi Berbasis TIK untuk Pelayanan Publik.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	-	-	-
					12	Tersedianya Sistem Monitoring Kota dengan Pemanfaatan TIK	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					13	Tersedianya Sistem Informasi berbasis TIK yang dapat Menunjang Pelayanan Publik	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					14	Tersedianya Sistem Informasi Terpadu Tentang Kota Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					15	Tersedianya Database yang Lengkap Tentang Potensi	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya Barang Cetakan dan	12	12 Bulan	-	-	-

						Daerah di Berbagaisektor (Pariwisata, Jasa dan Perdagangan)	Penggandaan	Penggandaan	Bulan					
					16	Tumbuhnya Ekonomi Kreatif di Bidang Komunikasi dan Informatika	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					17	Mendorong Pengembangan E- Commerce	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					18	Tersedianya Sistem Informasi yang dapat Mendorong Peningkatan PAD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	-	-	-	
					19	Peningkatan Metode kerja Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					20	Tersusunnya Pola Pengelolaan Data dan Informasi yang Aman, Efektif dan Efisien					-	-	-	
					21	Terjalinnya Kemitraan Mutualisme dengan Media Massa dalam Diseminasi Informasi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					22	Tersedianya Konten Informasi Pembangunan Daerah Baik dalam Format Digital Atau Cetak (Teks, Gambar dan Video)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					23	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Media Informasi Publik (Elektronik, Luar Ruang, Cetak dan Online)	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					24	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	98%	95%	-	-	-	
					25	Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi yang	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	

						Handal	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan					
					26	Tersedianya Regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi Sesuai Peraturan Perundungan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					27	Terjalinya Kemitraan Strategis dengan Para Penyelenggara Layanan Dibidang Pos dan Telekomunikasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					28	Terlaksananya Edukasi Terkait Penyelenggaraan Layananpos dan Telekomunikasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
							Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	29	Terbangunnya Pusat Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Percentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi</b>	100%	100%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi.  2. Tidak terlaksananya kerja sama dengan salah satu media online dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas komunikasi dan informatika	1. Tersediaanya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi  2. Lebih selektif dalam memilih media online untuk melakukan kerjasama di dinas komunikasi dan informatika.		

					30	Terlaksananya Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Keahlian ASN	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi).</li> <li>2. Tidak terlaksananya kerja sama dengan salah satu media online dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas komunikasi dan informatika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersediaanya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi)</li> <li>2. Lebih selektif dalam memilih media online untuk melakukan kerjasama di dinas komunikasi dan informatika.</li> </ul>	
					31	Terlaksananya Sosialisasi Danedukasi Tentang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
							Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
							Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
							PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Percentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	85%	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak sesuainya rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget</li> <li>2. Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi</li> <li>3. Pengurangan Pagu Anggaran (Rasionalisasi)</li> <li>4. Penetapan cash budget</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan cash budget disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung.</li> <li>3. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi</li> <li>4. Penetapan cash budget</li> </ul>	-



							Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	95%	90%	-	-	-
						Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	90%	1. Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan  2. Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien  3. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public  4. Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi ) sehingga ada item yang tidak dilaksanakan pada kegiatan tersebut.	1. Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat  2. Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien  3. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public.  4. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi	-
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-

					Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengedalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	12%	<p>1. Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan</p> <p>2. Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien</p> <p>3. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public</p> <p>4. Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi) sehingga ada item yang tidak dilaksanakan pada kegiatan tersebut.</p> <p>5. Adanya perubahan data pada Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>1. Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat</p> <p>2. Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien</p> <p>3. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public.</p> <p>4. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi</p> <p>5. Pendataan Ulang</p>	-
					Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	Adanya perubahan data pada Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	Pendataan Ulang	-
					Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	<p>1. Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan</p>	<p>1. Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan</p>	-

										Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan	Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat	
										2. Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien	2. Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien	
										3. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public	3. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public.	
										4. Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi) ada item yang tidak dilaksanakan pada kegiatan tersebut.	4. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi	
URUSAN STATISTIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada	-		-	-
					Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada	-		-	-
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Terintegrasinya Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	-		-	-

						Sektoral							
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksannya Operasional Literasi Data dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-
						Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-
						Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Terpeliharanya Jumlah Infrastruktur Data dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-
URUSAN PERSANDIAN						<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>	Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Pendataan Ulang	-	-
						Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	95%	90%	Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Pendataan Ulang	-	-
						Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang Terkelola dengan Baik	95%	90%	Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Pendataan Ulang	-	-
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengebagian dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Call Center dan Persandian untuk Keamanan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-

## BAB IV

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung tidak melaksanakan penyelenggaraan tugas pembantuan dan penugasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian LPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, LPJ ini disusun dengan maksud untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2024 termasuk capaian kinerjanya.

Apa yang telah dicapai pada Tahun 2024 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan dalam 1 (satu) tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun ini dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga LPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kota Bandar Lampung.

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

**RIZKY AGUNG ARIESANTHO, S.T.**  
**Pembina**  
**NIP. 19750407 200902 1 002**

**TABEL TC 33**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 DAN 2026**

	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Renja Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(1)	(2)	(7)	(8)	(13)	(14)	(15)	(14)	(15)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.995.629.638,00			12.948.013.798,00		13.595.414.487,90	
#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			14.627.432.768,00			12.503.329.683,00		13.128.496.167,15	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	5.347.621.323,00		100%	6.127.591.048,00	100%	6.433.970.600,40	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	3 Dokumen	24.000.000,00		100%	54.000.188,00	100%	56.700.197,40	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja, RKA dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	3 Dokumen	12.000.000,00		3 Dokumen	27.000.094,00	3 Dokumen	28.350.098,70	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, LPJ, LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	3 Dokumen	12.000.000,00		3 Dokumen	27.000.094,00	3 Dokumen	28.350.098,70	
	Administrasi Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD tepat waktu	100%	3.839.483.337,00		100%	4.520.847.718,00	100%	4.746.890.103,90	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.591.784.298,00		100%	4.272.238.798,00	100%	4.485.850.737,90	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	226.800.000,00		12 Bulan	228.600.000,00	12 Bulan	240.030.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	20.899.039,00		1 Dokumen	20.008.920,00	1 Dokumen	21.009.366,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	1 Ls	15.000.000,00		1 Ls	15.000.000,00	1 Ls	15.750.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	15.000.000,00		1 Ls	15.000.000,00	1 Ls	15.750.000,00	
	Administrasi Umum	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD	100%	183.898.386,00		100%	274.568.142,00	100%	288.296.549,10	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	%	38.503.178,00		12 Bulan	30.164.544,00	12 Bulan	31.672.771,20	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%	22.265.715,00		12 Bulan	15.976.335,00	12 Bulan	16.775.151,75	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Makanan dan Minuman	%	35.000.000,00		12 Bulan	8.875.000,00	12 Bulan	9.318.750,00	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	%	15.219.954,00		12 Bulan	10.240.000,00	12 Bulan	10.752.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	%	6.000.000,00		12 Bulan	-	12 Bulan	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	66.909.539,00		1 Ls	209.312.263,00	1 Ls	219.777.876,15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0,00		100%	-	100%	-
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0,00		100%	-	100%	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	75.189.600,00			300.000.000,00		
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya		%	75.189.600,00			300.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	768.000.000,00		12 Bulan	840.000.000,00	12 Bulan	882.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	24.000.000,00		12 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	25.200.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	744.000.000,00		12 Bulan	816.000.000,00	12 Bulan	856.800.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	442.050.000,00		100%	123.175.000,00	100%	129.333.750,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	42.430.000,00		12 Bulan	42.430.000,00	12 Bulan	44.551.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	41.620.000,00		12 Bulan	41.620.000,00	12 Bulan	43.701.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	56.000.000,00		12 Bulan	31.625.000,00	12 Bulan	33.206.250,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	-		-	-	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	302.000.000,00			7.500.000,00		7.875.000,00
	<b>PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik</b>	%	<b>5.860.513.244,00</b>		<b>100%</b>	<b>3.746.794.635,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.934.134.366,75</b>

	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1. Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung 2. Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID 4. Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah	12 Bulan	5.860.513.244,00		100%	3.746.794.635,00	100%	3.934.134.366,75
	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung	12 Bulan	-		1 Tahun	-	1 Tahun	-
	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Paket	2.865.194.070,00		1 Paket	1.258.000.000,00	1 Paket	1.320.900.000,00
	Penguatan Kapasitas Kawasan Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID	12 Bulan	47.000.000,00		12 Bulan	17.033.861,00	12 Bulan	17.885.554,05
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1 Paket	2.948.319.174,00		1 Tahun	2.471.760.774,00	1 Tahun	2.595.348.812,70
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Percentase Aplikasi IT dan Aplikasi Egovernment yang mendukung Smart City dan layanan publik yang berfungsi baik</b>	%	<b>3.419.298.201,00</b>		12 Bulan	<b>2.628.944.000,00</b>	12 Bulan	2.760.391.200,00
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Koneksi jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	1 Ls	1.837.534.708,00		1 Ls	1.756.372.481,00	1 Ls	1.844.191.105,05
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	1 Ls	1.837.534.708,00		1 Ls	1.756.372.481,00	1 Ls	1.844.191.105,05
	Pengelolaan e government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1. Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) 2.Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 3. Tersedianya Pengkajian dan Penelitian Sistem Keamanan Data		1.581.763.493,00			872.571.519,00		916.200.094,95
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	1 Ls	133.996.900,00		1 Ls	146.417.789,00	1 Ls	153.738.678,45
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terbentuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center	12 Bulan	1.447.766.593,00		12 Bulan	726.153.730,00	12 Bulan	762.461.416,50
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			<b>205.363.645,00</b>		100%	<b>154.220.000,00</b>	100%	161.931.000,00
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada	205.363.645,00		100%	154.220.000,00	100%	161.931.000,00

		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>1. Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Terbentuknya Operasional Literasi Data dan Informasi 3. Tersedianya Penyusunan Data Sektoral 4. Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik</b>	ada	<b>205.363.645,00</b>		100%	<b>154.220.000,00</b>	100%	<b>161.931.000,00</b>
		Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Ada	-		1 Tahun	-	1 Tahun	-
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Tersedianya Literasi Data dan Informasi	Ada	15.000.000,00		1 Ls	15.000.000,00	1 Ls	15.750.000,00
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Data Sektoral	Ada	106.598.645,00		1 Tahun	70.818.645,00	1 Tahun	74.359.577,25
		Pembangunan Infrastruktur	Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	Ada	83.765.000,00		12 Bulan	68.401.355,00	12 Bulan	71.821.422,75
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>162.833.225,00</b>		100%	<b>290.464.115,00</b>	100%	<b>304.987.320,75</b>
		<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara baik</b>	%	<b>162.833.225,00</b>		100%	<b>290.464.115,00</b>	100%	<b>304.987.320,75</b>
		<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran 2. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung 3. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian</b>	%	<b>162.833.225,00</b>		100%	<b>290.464.115,00</b>	100%	<b>304.987.320,75</b>
		Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran	%	69.996.679,00		1 Tahun	36.608.102,00	1 Tahun	38.438.507,10
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung	%	32.841.601,00		1 Tahun	66.469.894,00	1 Tahun	69.793.388,70
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian	%	59.994.945,00		1 Tahun	187.386.119,00	1 Tahun	196.755.424,95
					<b>14.995.629.638,00</b>			<b>12.948.013.798,00</b>		<b>13.595.414.487,90</b>

## Perubahan Anggaran

No.	Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan
1	2	3	4
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	-	-
	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	-	-
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor
		<b>Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Pengadaan Perlalatan Mesin Lainnya	
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel

		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Inventaris Kantor</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor
		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi</b>
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
		<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik</b>
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik
		Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengedalian Menara Telekomunikasi ( <b>SIDALIMENTAL</b> )
		Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base
	<b>URUSAN STATISTIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah</b>
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Tersedianya Literasi Data dan Informasi

	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral
	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik
<b>URUSAN PERSANDIAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentasae Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengebangunan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site
	Sub Kebijakan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Penegolalaan Call Center dan Persandian
<b>JUMLAH</b>		

**Tabel 2.9**  
**Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Lampung Tahun 2024**

Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Murni	Perubahan	Realisasi Perubahan
5	6	7	8	9
-	-	10.861.369.298,00	14.995.629.638,00	12.246.223.011,00
-	-	10.512.137.428,00	14.627.432.768,00	11.959.603.048,00
90%	90%	5.825.431.354,00	5.347.621.323,00	4.895.436.887,00
91%	91%	60.000.000,00	24.000.000,00	21.846.410,00
12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	12.000.000,00	11.868.160,00
12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	12.000.000,00	9.978.250,00
100%	92%	4.424.583.337,00	3.839.483.337,00	3.517.553.068,00
12 Bulan	12 Bulan	4.167.784.298,00	3.591.784.298,00	3.279.145.068,00
12 Bulan	12 Bulan	226.800.000,00	226.800.000,00	217.770.000,00
12 Bulan	12 Bulan	29.999.039,00	20.899.039,00	20.638.000,00
98%	95%	15.000.000,00	15.000.000,00	500.000,00
12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	500.000,00
100%	79%	117.798.017,00	183.898.386,00	144.362.854,00
12 Bulan	12 Bulan	29.998.479,00	38.503.178,00	38.045.600,00
12 Bulan	12 Bulan	14.990.045,00	22.265.715,00	22.075.700,00
12 Bulan	12 Bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	3.430.000,00
12 Bulan	12 Bulan	9.999.954,00	15.219.954,00	14.761.640,00
12 Bulan	12 Bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12 Bulan	12 Bulan	21.809.539,00	66.909.539,00	60.049.914,00
100%	100%	0	75.189.600,00	104.200.000,00
12 bulan	12 Bulan	0,00	75.189.600,00	104.200.000,00
100%	96%	0	0,00	0,00
12 Bulan	12 Bulan	0	0,00	0,00

100%	96%	768.000.000,00	768.000.000,00	760.000.000,00
100%	100%	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
12 Bulan	12 Bulan	744.000.000,00	744.000.000,00	736.000.000,00
100%	78%	440.050.000,00	442.050.000,00	346.974.555,00
12 Bulan	12 Bulan	42.430.000,00	42.430.000,00	37.489.000,00
12 Bulan	12 Bulan	41.620.000,00	41.620.000,00	33.445.555,00
12 Bulan	12 Bulan	56.000.000,00	56.000.000,00	14.300.000,00
12 Bulan	12 Bulan	300.000.000,00	302.000.000,00	261.740.000,00
100%	87%	2.957.319.174,00	5.860.513.244,00	5.071.860.920,00
100%	87%	2.957.319.174,00	5.860.513.244,00	5.071.860.920,00
12 Bulan	12 Bulan	1.248.500.000,00	2.865.194.070,00	2.850.183.184,00
12 Bulan	12 Bulan	47.000.000,00	47.000.000,00	26.995.227,00
12 Bulan	12 Bulan	1.661.819.174,00	2.948.319.174,00	2.194.682.509,00
100%	58%	1.729.386.900,00	3.419.298.201,00	1.992.305.241,00
100%	93%	1.537.534.708,00	1.837.534.708,00	1.704.349.492,00
12 Bulan	12 Bulan	1.537.534.708,00	1.837.534.708,00	1.704.349.492,00
95%	18%	191.852.192,00	1.581.763.493,00	287.955.749,00
12 Bulan	12 Bulan	109.996.900,00	133.996.900,00	131.630.750,00
12 Bulan	12 Bulan	81.855.292,00	1.447.766.593,00	156.324.999,00
Ada	Ada	181.598.645,00	205.363.645,00	166.458.691,00
Ada	Ada	181.598.645,00	205.363.645,00	166.458.691,00
12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

12 Bulan	12 Bulan	106.598.645,00	106.598.645,00	98.764.091,00
12 Bulan	12 Bulan	60.000.000,00	83.765.000,00	67.694.600,00
100%	74%	167.633.225,00	162.833.225,00	120.161.272,00
100%	74%	167.633.225,00	162.833.225,00	120.161.272,00
12 bulan	12 Bulan	69.996.679,00	69.996.679,00	60.905.572,00
12 Bulan	12 Bulan	37.641.601,00	32.841.601,00	838.000,00
12 Bulan	12 Bulan	59.994.945,00	59.994.945,00	58.417.700,00
		10.861.369.298,00	14.995.629.638,00	12.246.223.011,00

Bandar Lampung  
**DINAS KOMUNIKASI  
KOTA BA**

**RIZKY AGUNG**  
|  
197504

% Realisasi	Sisa Anggaran Pagu	Bertambah/Berkurang
10=9/8*100	11=8-9	12=8-7
82	2.749.406.627,00	4.134.260.340,00
82	2.667.829.720,00	4.115.295.340,00
92	452.184.436,00	-477.810.031,00
91	2.153.590,00	-36.000.000,00
99	131.840,00	-18.000.000,00
83	2.021.750,00	-18.000.000,00
92	321.930.269,00	-585.100.000,00
91	312.639.230,00	-576.000.000,00
96	9.030.000,00	0,00
99	261.039,00	-9.100.000,00
3	14.500.000,00	0,00
3	14.500.000,00	0,00
79	39.535.532,00	66.100.369,00
99	457.578,00	8.504.699,00
99	190.015,00	7.275.670,00
10	31.570.000,00	0,00
97	458.314,00	5.220.000,00
100	0,00	0,00
90	6.859.625,00	45.100.000,00
139	-29.010.400,00	75.189.600,00
139	-29.010.400,00	75.189.600,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

99	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
100	0,00	0,00
99	8.000.000,00	0,00
<b>78</b>	<b>95.075.445,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
88	4.941.000,00	0,00
80	8.174.445,00	0,00
26	41.700.000,00	0,00
87	40.260.000,00	2.000.000,00
<b>87</b>	<b>788.652.324,00</b>	<b>2.903.194.070,00</b>
<b>87</b>	<b>788.652.324,00</b>	<b>2.903.194.070,00</b>
99	15.010.886,00	1.616.694.070,00
57	20.004.773,00	<b>0,00</b>
74	753.636.665,00	1.286.500.000,00
<b>58</b>	<b>1.426.992.960,00</b>	<b>1.689.911.301,00</b>
<b>93</b>	<b>133.185.216,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
<b>93</b>	<b>133.185.216,00</b>	300.000.000,00
<b>18</b>	<b>1.293.807.744,00</b>	<b>1.389.911.301,00</b>
98	2.366.150,00	24.000.000,00
11	<b>1.291.441.594,00</b>	1.365.911.301,00
<b>81</b>	<b>38.904.954,00</b>	<b>23.765.000,00</b>
<b>81</b>	38.904.954,00	<b>23.765.000,00</b>
<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

93	7.834.554,00	0,00
81	16.070.400,00	23.765.000,00
74	42.671.953,00	-4.800.000,00
74	42.671.953,00	-4.800.000,00
87	9.091.107,00	0,00
3	32.003.601,00	-4.800.000,00
97	1.577.245,00	0,00
82	2.749.406.627,00	4.134.260.340,00

3, 2025

**KASI DAN INFORMATIKA  
NDAR LAMPUNG**

**NG ARIESANTHO, ST**

Pembina

07 200902 1 002



























































